



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian perjalanan dinas secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akun tabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akun tabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
9. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
13. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
15. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan surat tugas dan menerbitkan surat perintah perjalanan dinas.
16. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan Daerah yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan.
17. Pihak Lain adalah selain Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai ASN, dan pegawai Non ASN yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.
18. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukannya baik seorang maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk kepentingan negara/daerah atau atas perintah Pejabat yang Berwenang.
19. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
22. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor SKPD/unit SKPD/lokasi tertentu dimana penugasan Perjalanan Dinas ditetapkan.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain.
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang kepada pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugas.
27. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
28. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dibubuhi cap/stempel oleh lembaga ataupun badan usaha ataupun penyedia jasa yang sesuai dibidangnya.
29. Uang Representasi adalah tambahan biaya yang diberikan bagi seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam rangka Perjalanan Dinas.
30. Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting adalah izin untuk melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu karena alasan penting yang telah disetujui oleh Pejabat yang Berwenang.
31. Paspor Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Pejabat Negara, , pimpinan dan anggota DPRD serta ASN di pemerintahan Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka penugasan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

32. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
33. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta dan lembaga di dalam negeri, pemerintah negara asing, badan dan organisasi internasional, badan swasta asing dan perusahaan swasta asing.
34. Anggota Keluarga adalah meliputi suami/istri dan anak.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pengaturan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. sebagai dasar bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
 - b. tertib administrasi dan tertib penatausahaan Perjalanan Dinas.

Pasal 3

Ruang Lingkup materi Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Prinsip Perjalanan Dinas;
- b. Perjalanan Dinas;
- c. Biaya Perjalanan Dinas;
- d. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- c. pengumandahan (*datasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN dan Pegawai Non ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah
- (3) Perjalanan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perjalanan Dinas;
 - b. perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting.

Pasal 7

Pelaksana Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pimpinan dan anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Calon ASN;
- e. Pegawai Non ASN; dan
- f. Pihak Lain.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Paragraf 1
Perjalanan Dinas Dalam Jabatan
Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Pindah
Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada dilakukan oleh pelaksana SPD berdasarkan keputusan pindah/mutasi.
- (2) Keputusan Pindah/Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Bagian Ketiga
SPT dan SPD
Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah Pejabat yang Berwenang dan tertuang dalam SPT dan SPD dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau manual.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan;
 - b. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II/b Kepala Dinas/Badan dan Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, terkecuali bilamana Sekretaris Daerah tidak berada di tempat atau sedang melaksanakan tugas penandatanganan Surat Perintah Tugas dapat ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya;
 - d. Pejabat Eselon III pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
 - e. Pejabat Eselon IV/pejabat fungsional pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditanda tangani oleh Pejabat Eselon III/selaku atasan langsung;
 - f. Pejabat Eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Pejabat Eselon III
 - g. Pejabat Eselon III pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan;
 - h. Pegawai Non Eselon (staf), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non ASN pada SKPD ditandatangani oleh Pejabat Eselon III;
 - i. ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Eselon IV;dan
 - j. Tenaga Ahli DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan berdasarkan rekomendasi Ketua Fraksi/Ketua Pansus.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
- a. pelaksana tugas;
 - b. waktu pelaksanaan tugas;
 - c. tempat pelaksanaan tugas;
 - d. maksud pelaksanaan tugas; dan
 - e. pemberi tugas.
- (4) Dalam hal Pejabat yang berwenang menandatangani SPT berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnya.
- (5) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Pasal 11

- (1) SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditandatangani oleh PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran.
- (2) Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kolom "tiba di" dan "berangkat dari" ditandatangani oleh pejabat/pimpinan Institusi yang dituju dengan dibubuhi stempel.
 - b. pejabat/pimpinan institusi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. institusi pemerintah adalah pejabat struktural/pejabat fungsional yang disetarakan; dan
 2. institusi non pemerintah adalah pimpinan/pejabat/pegawai yang berwenang.
- (4) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Paragraf 1

Pasal 12

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri.
- (2) Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas; dan
 - b. Perjalanan Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Paragraf 2

Izin Perjalanan ke Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Dalam memberikan izin perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

Paragraf 3

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, memenuhi kriteria:
 - a. selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Kementerian dan Pemerintahan Daerah;
 - d. efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
 - e. kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - f. keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Kementerian dan Pemerintahan Daerah
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dilakukan bagi Pejabat Negara dalam waktu yang bersamaan.
- (3) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, Bupati dan/atau Wakil Bupati wajib didampingi pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada SKPD yang menangani tugas dan fungsi berkaitan dengan tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD, Perjalanan Dinas dapat didampingi oleh pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada SKPD terkait.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi pejabat pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Bupati.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. studi banding;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. konferensi;
 - j. pertemuan Internasional;
 - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
 - l. narasumber/pembicara.
- (2) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
 - a. peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- b. peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah;
dan
 - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan nama kegiatan, jadwal, dan tempat kegiatan yang dimuat dalam undangan.

Pasal 18

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, tidak dapat dilakukan, dalam hal:

- a. terjadi bencana alam di wilayahnya;
- b. terjadi bencana sosial di wilayahnya;
- c. pemilihan umum legislatif;
- d. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
- e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Paragraf 4

Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b. surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
 - d. *exit permit*; dan
 - e. Visa untuk negara tertentu.
- (3) Pengajuan permohonan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

Pasal 20

- (1) Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri.
- (2) Surat permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat undangan/surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. rincian biaya Perjalanan Dinas;
 - f. data personil peserta;
 - g. surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja; dan
 - h. keterangan urgensi keikutsertaan peserta.
- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi ASN;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. waktu pelaksanaan; dan
 - g. sumber pendanaan.

Pasal 21

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disertai dengan lampiran berupa dokumen yang sesuai dengan tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (1) Lampiran dokumen yang disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, disertai dengan kajian rencana kerja sama;
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan surat pernyataan kehendak dan/atau naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah, disertai dengan surat profil daerah yang akan dipromosikan;
- d. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan kunjungan persahabatan, disertai dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
- e. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan pendidikan dan pelatihan, disertai dengan keterangan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan bidang masing-masing dari negara yang dituju;
- f. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan studi banding disertai dokumen yang menyatakan urgensi dari pelaksanaan studi banding dimaksud;
- g. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan seminar dan lokakarya, disertai keterangan urgensi seminar/lokakarya yang akan dihadiri dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi;
- h. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan konferensi dan pertemuan internasional, disertai undangan dari kementerian/lembaga terkait;
- i. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan penandatanganan naskah kerja sama, disertai dengan surat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- j. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan menjadi narasumber/pembicara, disertai dengan surat keterangan bahwa biaya ditanggung oleh negara pengundang.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

Paragraf 5

Pengajuan Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Bupati mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Jumlah Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Jangka Waktu

Pasal 23

- (1) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling banyak 5 (lima) orang termasuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan SKPD terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah;
 - c. kunjungan persahabatan; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jangka Waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:
 - a. perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

- b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 7

Pengesahan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Paragraf 8

Perjalanan Dinas ke Negara yang Tidak Mempunyai
Hubungan Diplomatik

Pasal 26

Perjalanan Dinas Luar Negeri ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan kementerian luar negeri melalui permohonan dari Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Pembatalan atau Perubahan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 27

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang tidak jadi dilaksanakan/terjadi pembatalan dan perubahan jadwal, pemohon izin Perjalanan Dinas Luar Negeri menyampaikan surat pemberitahuan pembatalan atau perubahan jadwal Perjalanan Dinas Luar Negeri sebelum keberangkatan, dengan menyebutkan alasan pembatalan kepada Kementerian, kementerian luar negeri, dan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

kementerian sekretariat negara serta melampirkan surat rekomendasi awal yang telah terbit.

Paragraf 10

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Dibiayai oleh Pihak Ketiga

Pasal 28

- (1) Penyampaian permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dibiayai oleh Pihak Ketiga disertai dengan surat pernyataan dibiayai dari Pihak Ketiga.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Paragraf 11

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting

Pasal 29

- (1) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting dilakukan untuk:
 - a. melaksanakan ibadah agama;
 - b. menjalani pengobatan; dan
 - c. kepentingan keluarga.
- (2) Kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
 - a. menghadiri acara wisuda anak, istri/suami;
 - b. mengurus pendidikan Anggota Keluarga;
 - c. mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri;
 - d. menghadiri perkawinan Anggota Keluarga; dan
 - e. kedukaan Anggota Keluarga.
- (3) Perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

Pasal 30

- (1) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting tidak dapat dilakukan bagi Pejabat Negara dalam waktu yang bersamaan, selain karena keperluan kedukaan Anggota Keluarga.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

- (2) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting tidak dapat diberikan bagi Pejabat Negara dalam hal di suatu Daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan dan bencana alam, kecuali untuk menjalani pengobatan, kegiatan keagamaan dan kedukaan Anggota Keluarga.

Pasal 31

- (1) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk melaksanakan ibadah agama meliputi:
- a. surat keterangan terdaftar sebagai peserta perjalanan ibadah agama oleh penyelenggara ibadah keagamaan;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.
- (2) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan meliputi:
- a. surat keterangan yang memberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.
- (3) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga meliputi:
- a. surat undangan atau pemberitahuan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada yang bersangkutan atas pelaksanaan wisuda anak, istri/suami di Luar Negeri;
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri yang menyatakan Anggota Keluarga yang bersangkutan dalam perawatan;
 - c. surat undangan perkawinan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - d. surat pemberitahuan adanya berita kedukaan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - e. surat pemberitahuan adanya kepentingan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

- f. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.

Paragraf 12

Jangka Waktu

Pasal 32

- (1) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalankan ibadah haji diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dan untuk menjalankan ibadah agama selain haji paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga paling lama 5 (lima) Hari.

Paragraf 13

Tata Cara Pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan
Alasan Penting

Pasal 33

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting kepada Menteri melalui Gubernur disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 14

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah melaporkan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

- (2) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
- (4) Format laporan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Pendanaan

Pasal 35

- (1) Pendanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan yang berasal dari Pihak Ketiga.
- (2) Pendanaan untuk Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting berasal dari biaya pribadi.
- (3) Biaya tiket luar negeri dan uang harian luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikutsertakan Anggota Keluarga, permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri diajukan dengan melampirkan surat keterangan ikut serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keikutsertaan Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan dengan biaya pribadi.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat meminta pendampingan dari Pemerintah Pusat dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Standar Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 38

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I serta Pejabat lainnya yang setara);
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Utama serta Pejabat lainnya yang setara;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV; dan
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, PPPK, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a dibagi menjadi 2 (dua):
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Dalam Provinsi
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Luar Provinsi
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 2 (dua) paket kategori:
 - a. Kategori I : dengan besaran standar biaya tingkat A.
 - b. Kategori II : dengan besaran standar biaya tingkat B, C dan D
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah dibagi menjadi 2 (dua) paket kategori:
 - a. Kategori I untuk tujuan kecamatan sandaran dan kecamatan busang (atau sebaliknya);
 - b. Kategori II untuk tujuan ke kecamatan selain huruf a.
- (5) Tingkat standar biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jenis tingkatan penggolongan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pasal 39

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen:

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam Daerah; dan
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah

Pasal 40

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dibayarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan:
 - a. dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. melewati batas Daerah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keperluan:
 - a. uang saku;
 - b. transportasi lokal; dan
 - c. uang makan.
- (4) Perjalanan Dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (5) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Lumpsum sesuai dengan jumlah Hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan mengacu pada jumlah Hari yang tercantum dalam SPT.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.

- (7) Penugasan Perjalanan Dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan dan merupakan satu kesatuan penugasan dan/atau waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan sebesar 1 (satu) kali uang harian dalam daerah.
- (8) Besaran uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. biaya tol dan/ atau retribusi yang dipungut di terminal bus/bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya transpor perjalanan darat; dan
 - d. sewa kendaraan.
- (3) Biaya tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air pergi pulang (PP) dari bandara/terminal/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/terminal/stasiun/pelabuhan kota tujuan.
- (4) Pembiayaan tiket pesawat Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. biaya taksi keberangkatan:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

1. dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan.
- b. biaya taksi kepulangan:
 1. dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.
- (6) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (7) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (8) Biaya transpor darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. biaya transportasi darat luar daerah; dan
 - b. biaya transportasi darat dalam daerah
- (9) Dalam hal transportasi darat menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional sewa dapat diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak dengan besaran senilai biaya transportasi (PP) atau Carter (One Way) dengan batasan tertinggi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (10) Pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU berupa setruk pembelian.
- (11) Apabila tidak mendapatkan bukti pembelian yang sah maka melampirkan surat pernyataan riil (khusus perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur yang tidak terdapat SPBU).
- (12) Tanggal setruk bukti pembelian BBM dari SPBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) sesuai dengan tanggal pelaksanaan perjalanan dinas yang tercantum dalam SPT, dan dapat dibeli 1 (satu) hari sebelum tanggal SPT perjalanan dinas.
- (13) Transpor perjalanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menggunakan kendaraan carter dengan ketentuan:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

- a. untuk perjalanan dinas luar daerah, 1 (satu) unit kendaraan carter digunakan untuk maksimal 4 orang pelaksana perjalanan dinas;
 - b. untuk perjalanan dinas dalam daerah, 1 (satu) unit kendaraan carter digunakan untuk minimal 1 orang pelaksana perjalanan dinas;
 - c. batas maksimal pelaksana perjalanan dinas untuk 1 (satu) unit kendaraan carter adalah 4 (empat) orang; dan
 - d. biaya carter hanya dibebankan kepada 1 (satu) orang untuk 1 (satu) unit kendaraan carter (sesuai huruf c) yang merupakan biaya keberangkatan dan kepulangan (bukan sewa) yang merupakan biaya riil, selebihnya pelaksana perjalanan dinas tidak diberikan biaya transportasi.
- (14) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan hanya untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan insidental yang digunakan untuk kebutuhan sifatnya tidak terus.
- (15) Biaya bantuan bahan bakar minyak Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan sewa disesuaikan dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU atau bukti pembelian yang sah, Apabila tidak mendapatkan bukti yang sah maka melampirkan surat pernyataan riil.
- (16) Dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pasal 42

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- b. di hotel; atau
 - c. di tempat menginap lainnya.
- (2) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
- a. dibayarkan sesuai Biaya Riil berdasarkan jumlah Hari yang digunakan; dan
 - b. diberikan kepada pejabat/pegawai/atau pimpinan/anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus/*workshop*/seminar/pelatihan/bimbingan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak Hari penyelenggaraan, dengan ketentuan panitia penyelenggara tidak menyediakan penginapan.

- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota Tempat Tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara Lumpsum.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan dalam hal:
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket *fullboard*; atau
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara sesuai bukti riil.
- (5) Besaran satuan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Uang Representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum sesuai dengan jumlah Hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) Besaran Uang Representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Keikutsertaan Pihak Lain dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah yang meliputi:

- a. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- b. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 46

Seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jumlah Hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah Hari yang ditetapkan dalam SPT/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan uang harian.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/penyedia transportasi lainnya; dan/atau;
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Dalam hal jumlah Hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah Hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi yang telah diterimanya kepada bendahara.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 30 -

Pasal 48

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, ditanggung panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud tidak dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPD.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebagian panitia penyelenggara, sebagian biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPD.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPD.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Prosedur

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 49

- (1) Perjalanan Dinas untuk setiap kali penugasan paling lama:
 - a. 4 (empat) Hari untuk Perjalanan Dinas di luar daerah; dan
 - b. 5 (lima) Hari untuk Perjalanan Dinas di dalam Daerah.
 - c. kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi batas maksimal yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi penyelenggara kegiatan.
- (2) ASN dan Pegawai Non ASN yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis maupun fungsional yang telah membayar biaya pelatihan (kontribusi) diberikan:
 - a. Perjalanan dinas selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari untuk keberangkatan menuju tempat pelatihan dan 1 (satu) hari untuk kepulangan menuju tempat asal keberangkatan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 31 -

- b. Untuk selebihnya diberikan uang harian selama mengikuti pelatihan.
- (3) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang pelaksanaannya melebihi Hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja penerbit SPT.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (5) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke kas umum Daerah melalui bendahara pengeluaran SKPD.
- (6) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari biaya yang seharusnya berdasarkan bukti riil sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan standarisasi biaya Perjalanan Dinas, bendahara pengeluaran wajib membayarkan sisa dari kekurangan tersebut.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 51

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) SPD harus mendapatkan pengesahan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPD.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 32 -

- (4) Untuk perhitungan jumlah Hari Perjalanan Dinas dalam SPD dicantumkan:
- a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh PPTK/KPA/PA;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari Tempat Tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang.

Pasal 52

- (1) ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri harus membuat laporan Perjalanan Dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. SPT yang sah dari Pejabat yang Berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti tiket, boarding pass pesawat/kapal air / kereta / bus, bukti biaya masuk/retribusi/airport tax bandara udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran modal transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
 - d. bukti pembayaran uang harian, Uang Representasi dan uang hotel/penginapan 30% (tiga puluh persen) cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan pada rincian biaya Perjalanan Dinas yang diketahui oleh PA/KPA;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi maupun carter kendaraan berupa kuitansi maupun tiket yang dibubuhi stempel yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 33 -

kendaraan atau jasa transportasi ataupun bukti pembayaran lainnya; dan

- g. Pernyataan kebenaran pengeluaran Biaya Riil (bukti pengganti pengeluaran biaya) dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf e tidak diperoleh / hilang / rusak / mengalami musibah/ pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti pengeluaran riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- h. Laporan hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal 53

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) PA/KPA/PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) PA/KPA/PPTK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- (4) Selisih biaya transpor Perjalanan Dinas yang telah diterima dengan Biaya Riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran.
- (5) Format rincian biaya dan kuitansi/bukti pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 34 -

Pasal 54

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara Lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akurasi.
- (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPD yang telah ditanda tangani oleh PA/KPA dan Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas,
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum;
 - d. pakta integritas; dan
 - e. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal 55

- (1) Pejabat yang Berwenang memberikan SPT, menerbitkan SPD, dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Pegawai Non ASN dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 35 -

- (2) Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Pegawai Non ASN yang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tuntutan ganti rugi.

Pasal 57

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana transfer yang bersifat terikat dan penggunaannya sudah ditentukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya lainnya dapat ditanggung dalam komponen biaya Perjalanan Dinas selama diprasyarkan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 36 -

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 94



Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, S.H., M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

NO	TINGKAT PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I serta Pejabat lainnya yang setara	BISNIS	KELAS IA/VIP	SPESIAL/EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
2	Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Utama serta Pejabat lainnya yang setara.	EKONOMI	KELAS IB	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
3	Tingkat C untuk Pejabat Esselon III/PNS Gol IV.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
4	Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, PPPK, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	Rp 13,285,000	Rp 7,081,000
2	Jakarta	Balikpapan	Rp 7,412,000	Rp 3,797,000
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp 7,519,000	Rp 4,492,000
4	Jakarta	Bandar Lampung	Rp 2,407,000	Rp 1,583,000
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp 5,252,000	Rp 2,995,000
6	Jakarta	Batam	Rp 4,867,000	Rp 2,888,000
7	Jakarta	Bengkulu	Rp 4,364,000	Rp 2,621,000
8	Jakarta	Biak	Rp 14,065,000	Rp 7,519,000
9	Jakarta	Denpasar	Rp 5,305,000	Rp 3,262,000
10	Jakarta	Gorontalo	Rp 7,231,000	Rp 4,824,000
11	Jakarta	Jambi	Rp 4,065,000	Rp 2,460,000
12	Jakarta	Jayapura	Rp 14,568,000	Rp 8,193,000
13	Jakarta	Yogyakarta	Rp 4,107,000	Rp 2,268,000
14	Jakarta	Kendari	Rp 7,658,000	Rp 4,182,000
15	Jakarta	Kupang	Rp 9,413,000	Rp 5,081,000
16	Jakarta	Makassar	Rp 7,444,000	Rp 3,829,000
17	Jakarta	Malang	Rp 4,599,000	Rp 2,695,000
18	Jakarta	Mamuju	Rp 7,295,000	Rp 4,867,000
19	Jakarta	Manado	Rp 10,824,000	Rp 5,102,000
20	Jakarta	Manokwari	Rp 16,226,000	Rp 10,824,000
21	Jakarta	Mataram	Rp 5,316,000	Rp 3,230,000
22	Jakarta	Medan	Rp 7,252,000	Rp 3,808,000
23	Jakarta	Padang	Rp 5,530,000	Rp 2,952,000
24	Jakarta	Palangkaraya	Rp 4,984,000	Rp 2,984,000
25	Jakarta	Palembang	Rp 3,861,000	Rp 2,268,000
26	Jakarta	Palu	Rp 9,348,000	Rp 5,113,000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp 3,412,000	Rp 2,139,000
28	Jakarta	Pekanbaru	Rp 5,583,000	Rp 3,016,000
29	Jakarta	Pontianak	Rp 4,353,000	Rp 2,781,000
30	Jakarta	Semarang	Rp 3,861,000	Rp 2,182,000
31	Jakarta	Solo	Rp 3,861,000	Rp 2,342,000
32	Jakarta	Surabaya	Rp 5,466,000	Rp 2,674,000
33	Jakarta	Ternate	Rp 10,001,000	Rp 6,664,000
34	Jakarta	Timika	Rp 13,830,000	Rp 7,487,000
	Jakarta	Tanjung Selor	Rp 7,424,000	Rp 4,057,000
35	Ambon	Denpasar	Rp 8,054,000	Rp 4,471,000
36	Ambon	Jayapura	Rp 7,434,000	Rp 4,161,000
37	Ambon	Kendari	Rp 4,824,000	Rp 2,856,000
38	Ambon	Makassar	Rp 6,022,000	Rp 3,455,000
39	Ambon	Manokwari	Rp 5,177,000	Rp 3,027,000
40	Ambon	Palu	Rp 6,140,000	Rp 3,508,000
41	Ambon	Sorong	Rp 3,637,000	Rp 2,257,000
42	Ambon	Surabaya	Rp 8,803,000	Rp 4,845,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	Ambon	Ternate	Rp 4,022,000	Rp 2,449,000
44	Balikpapan	Banda Aceh	Rp 12,739,000	Rp 6,749,000
45	Balikpapan	Batam	Rp 10,354,000	Rp 5,305,000
46	Balikpapan	Denpasar	Rp 10,739,000	Rp 5,648,000
47	Balikpapan	Jayapura	Rp 19,071,000	Rp 10,086,000
48	Balikpapan	Yogyakarta	Rp 9,669,000	Rp 4,749,000
49	Balikpapan	Makassar	Rp 12,664,000	Rp 6,150,000
50	Balikpapan	Manado	Rp 15,702,000	Rp 7,295,000
51	Balikpapan	Medan	Rp 12,493,000	Rp 6,140,000
52	Balikpapan	Padang	Rp 10,942,000	Rp 5,369,000
53	Balikpapan	Palembang	Rp 9,445,000	Rp 4,749,000
54	Balikpapan	Pekanbaru	Rp 10,996,000	Rp 5,423,000
55	Balikpapan	Semarang	Rp 9,445,000	Rp 4,674,000
56	Balikpapan	Solo	Rp 9,445,000	Rp 4,813,000
57	Balikpapan	Surabaya	Rp 10,889,000	Rp 5,113,000
58	Balikpapan	Timika	Rp 18,408,000	Rp 9,445,000
59	Balikpapan	Bandung	Rp 7,412,000	Rp 3,797,000
60	Balikpapan	Banjarmasin	Rp -	Rp 2,400,000
61	Balikpapan	Palangkaraya	Rp -	Rp 3,797,000
62	Balikpapan	Kupang	Rp 10,750,000	Rp 5,615,000
63	Balikpapan	Labuan Bajo	Rp 10,750,000	Rp 5,615,000
64	Balikpapan	Sangatta	Rp -	Rp 1,150,000
65	Banda Aceh	Denpasar	Rp 10,835,000	Rp 6,279,000
66	Banda Aceh	Jayapura	Rp 19,167,000	Rp 10,717,000
67	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp 9,765,000	Rp 5,380,000
68	Banda Aceh	Makassar	Rp 12,760,000	Rp 6,781,000
69	Banda Aceh	Manado	Rp 15,798,000	Rp 7,926,000
70	Banda Aceh	Pontianak	Rp 9,990,000	Rp 5,840,000
71	Banda Aceh	Semarang	Rp 9,530,000	Rp 5,305,000
72	Banda Aceh	Solo	Rp 9,530,000	Rp 5,444,000
73	Banda Aceh	Surabaya	Rp 10,985,000	Rp 5,744,000
74	Banda Aceh	Timika	Rp 18,504,000	Rp 10,076,000
75	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp 8,129,000	Rp 4,129,000
76	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp 8,225,000	Rp 4,760,000
77	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp 6,193,000	Rp 3,412,000
78	Bandar Lampung	Batam	Rp 5,840,000	Rp 3,316,000
79	Bandar Lampung	Biak	Rp 14,119,000	Rp 7,487,000
80	Bandar Lampung	Denpasar	Rp 6,236,000	Rp 3,647,000
81	Bandar Lampung	Jayapura	Rp 14,568,000	Rp 8,097,000
82	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp 5,155,000	Rp 2,760,000
83	Bandar Lampung	Kendari	Rp 8,354,000	Rp 4,482,000
84	Bandar Lampung	Makassar	Rp 8,161,000	Rp 4,161,000
85	Bandar Lampung	Malang	Rp 5,594,000	Rp 3,134,000
86	Bandar Lampung	Manado	Rp 11,199,000	Rp 5,305,000
87	Bandar Lampung	Mataram	Rp 6,246,000	Rp 3,626,000
88	Bandar Lampung	Medan	Rp 7,979,000	Rp 4,150,000
89	Bandar Lampung	Padang	Rp 6,439,000	Rp 3,380,000
90	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp 5,947,000	Rp 3,401,000
91	Bandar Lampung	Palembang	Rp 4,931,000	Rp 2,760,000
92	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp 6,482,000	Rp 3,433,000
93	Bandar Lampung	Pontianak	Rp 5,380,000	Rp 3,220,000
94	Bandar Lampung	Samarinda	Rp 8,129,000	Rp 4,129,000
95	Bandar Lampung	Semarang	Rp 4,931,000	Rp 2,685,000
96	Bandar Lampung	Solo	Rp 4,931,000	Rp 2,824,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
97	Bandar Lampung	Surabaya	Rp 6,386,000	Rp 3,123,000
98	Bandar Lampung	Timika	Rp 13,905,000	Rp 7,455,000
99	Bandung	Batam	Rp 6,289,000	Rp 3,583,000
100	Bandung	Denpasar	Rp 5,626,000	Rp 3,252,000
101	Bandung	Jakarta	Rp 2,064,000	Rp 1,476,000
102	Bandung	Jambi	Rp 5,006,000	Rp 2,941,000
103	Bandung	Yogyakarta	Rp 3,369,000	Rp 2,129,000
104	Bandung	Padang	Rp 6,129,000	Rp 3,508,000
105	Bandung	Palembang	Rp 4,385,000	Rp 2,631,000
106	Bandung	Pangkal Pinang	Rp 4,599,000	Rp 2,738,000
107	Bandung	Pekanbaru	Rp 6,525,000	Rp 3,701,000
108	Bandung	Semarang	Rp 3,027,000	Rp 1,957,000
109	Bandung	Solo	Rp 3,647,000	Rp 2,268,000
110	Bandung	Surabaya	Rp 4,824,000	Rp 2,856,000
111	Bandung	Tanjung Pandan	Rp 4,439,000	Rp 2,663,000
112	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp 10,792,000	Rp 6,022,000
113	Banjarmasin	Batam	Rp 8,407,000	Rp 4,578,000
114	Banjarmasin	Biak	Rp 16,686,000	Rp 8,749,000
115	Banjarmasin	Denpasar	Rp 8,792,000	Rp 4,920,000
116	Banjarmasin	Jayapura	Rp 17,135,000	Rp 9,359,000
117	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp 7,723,000	Rp 4,022,000
118	Banjarmasin	Medan	Rp 10,546,000	Rp 5,412,000
119	Banjarmasin	Padang	Rp 9,006,000	Rp 4,642,000
120	Banjarmasin	Palembang	Rp 7,498,000	Rp 4,022,000
121	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp 9,049,000	Rp 4,696,000
122	Banjarmasin	Semarang	Rp 7,498,000	Rp 3,958,000
123	Banjarmasin	Solo	Rp 7,498,000	Rp 4,097,000
124	Banjarmasin	Surabaya	Rp 8,942,000	Rp 4,385,000
125	Banjarmasin	Timika	Rp 16,472,000	Rp 8,717,000
126	Batam	Banda Aceh	Rp 10,439,000	Rp 5,936,000
127	Batam	Denpasar	Rp 8,450,000	Rp 4,824,000
128	Batam	Jayapura	Rp 16,782,000	Rp 9,263,000
129	Batam	Yogyakarta	Rp 7,370,000	Rp 3,936,000
130	Batam	Makassar	Rp 10,375,000	Rp 5,337,000
131	Batam	Manado	Rp 13,413,000	Rp 6,482,000
132	Batam	Medan	Rp 10,193,000	Rp 5,316,000
133	Batam	Padang	Rp 8,653,000	Rp 4,546,000
134	Batam	Palembang	Rp 7,145,000	Rp 3,936,000
135	Batam	Pekanbaru	Rp 8,707,000	Rp 4,599,000
136	Batam	Pontianak	Rp 7,594,000	Rp 4,396,000
137	Batam	Semarang	Rp 7,145,000	Rp 3,861,000
138	Batam	Solo	Rp 7,145,000	Rp 4,000,000
139	Batam	Surabaya	Rp 8,600,000	Rp 4,300,000
140	Batam	Timika	Rp 16,119,000	Rp 8,621,000
141	Bengkulu	Palembang	Rp 2,899,000	Rp 1,893,000
142	Biak	Balikpapan	Rp 18,622,000	Rp 9,477,000
143	Biak	Banda Aceh	Rp 18,718,000	Rp 10,108,000
144	Biak	Batam	Rp 16,333,000	Rp 8,664,000
145	Biak	Denpasar	Rp 16,729,000	Rp 8,995,000
146	Biak	Jayapura	Rp 3,615,000	Rp 2,321,000
147	Biak	Yogyakarta	Rp 15,648,000	Rp 8,108,000
148	Biak	Manado	Rp 11,734,000	Rp 6,353,000
149	Biak	Medan	Rp 18,472,000	Rp 9,498,000
150	Biak	Padang	Rp 16,932,000	Rp 8,728,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
151	Biak	Palembang	Rp 15,424,000	Rp 8,108,000
152	Biak	Pekanbaru	Rp 16,985,000	Rp 8,781,000
153	Biak	Pontianak	Rp 15,873,000	Rp 8,568,000
154	Biak	Samarinda	Rp 18,622,000	Rp 9,477,000
155	Biak	Surabaya	Rp 12,782,000	Rp 7,081,000
156	Biak	Timika	Rp 5,808,000	Rp 3,444,000
157	Denpasar	Jayapura	Rp 11,680,000	Rp 6,845,000
158	Denpasar	Kupang	Rp 5,091,000	Rp 2,952,000
159	Denpasar	Makassar	Rp 4,182,000	Rp 2,631,000
160	Denpasar	Manado	Rp 7,851,000	Rp 4,278,000
161	Denpasar	Mataram	Rp 1,840,000	Rp 1,390,000
162	Denpasar	Medan	Rp 10,589,000	Rp 5,658,000
163	Denpasar	Padang	Rp 9,049,000	Rp 4,888,000
164	Denpasar	Palangkaraya	Rp 8,557,000	Rp 4,909,000
165	Denpasar	Palembang	Rp 7,541,000	Rp 4,278,000
166	Denpasar	Pekanbaru	Rp 9,092,000	Rp 4,942,000
167	Denpasar	Pontianak	Rp 7,990,000	Rp 4,738,000
168	Denpasar	Timika	Rp 10,140,000	Rp 6,129,000
169	Jambi	Balikpapan	Rp 7,733,000	Rp 4,407,000
170	Jambi	Banjarmasin	Rp 7,690,000	Rp 4,193,000
171	Jambi	Denpasar	Rp 7,733,000	Rp 4,439,000
172	Jambi	Yogyakarta	Rp 6,653,000	Rp 3,551,000
173	Jambi	Kupang	Rp 11,434,000	Rp 6,075,000
174	Jambi	Makassar	Rp 9,659,000	Rp 4,952,000
175	Jambi	Malang	Rp 7,091,000	Rp 3,925,000
176	Jambi	Manado	Rp 12,707,000	Rp 6,097,000
177	Jambi	Palangkaraya	Rp 7,444,000	Rp 4,193,000
178	Jambi	Pontianak	Rp 6,878,000	Rp 4,011,000
179	Jambi	Samarinda	Rp 7,733,000	Rp 4,407,000
180	Jambi	Semarang	Rp 6,428,000	Rp 3,476,000
181	Jambi	Solo	Rp 6,428,000	Rp 3,615,000
182	Jambi	Surabaya	Rp 7,883,000	Rp 3,915,999
183	Jayapura	Yogyakarta	Rp 13,274,000	Rp 7,690,000
184	Jayapura	Manado	Rp 22,109,000	Rp 11,263,000
185	Jayapura	Medan	Rp 18,932,000	Rp 10,097,000
186	Jayapura	Padang	Rp 17,381,000	Rp 9,327,000
187	Jayapura	Palembang	Rp 15,873,000	Rp 8,717,000
188	Jayapura	Pekanbaru	Rp 17,435,000	Rp 9,380,000
189	Jayapura	Pontianak	Rp 16,322,000	Rp 9,177,000
190	Jayapura	Timika	Rp 3,615,000	Rp 2,289,000
191	Yogyakarta	Denpasar	Rp 3,861,000	Rp 2,481,000
192	Yogyakarta	Makassar	Rp 6,525,000	Rp 3,893,000
193	Yogyakarta	Manado	Rp 10,536,000	Rp 5,722,000
194	Yogyakarta	Medan	Rp 9,519,000	Rp 4,770,000
195	Yogyakarta	Padang	Rp 7,969,000	Rp 4,000,000
196	Yogyakarta	Palembang	Rp 6,460,000	Rp 3,380,000
197	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp 8,022,000	Rp 4,054,000
198	Yogyakarta	Pontianak	Rp 6,910,000	Rp 3,840,000
199	Yogyakarta	Timika	Rp 11,894,000	Rp 7,038,000
200	Kendari	Banda Aceh	Rp 12,953,000	Rp 7,102,000
201	Kendari	Batam	Rp 10,568,000	Rp 5,658,000
202	Kendari	Denpasar	Rp 5,455,000	Rp 3,273,000
203	Kendari	Yogyakarta	Rp 8,129,000	Rp 4,706,000
204	Kendari	Padang	Rp 11,167,000	Rp 5,722,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
205	Kendari	Palembang	Rp 9,659,000	Rp 5,102,000
206	Kendari	Pekanbaru	Rp 11,220,000	Rp 5,776,000
207	Kendari	Semarang	Rp 9,659,000	Rp 5,027,000
208	Kendari	Solo	Rp 9,659,000	Rp 5,166,000
209	Kendari	Surabaya	Rp 11,103,000	Rp 5,466,000
210	Kendari	Timika	Rp 18,633,000	Rp 9,798,000
211	Kupang	Jayapura	Rp 14,386,000	Rp 8,108,000
212	Kupang	Yogyakarta	Rp 7,348,000	Rp 4,182,000
213	Kupang	Makassar	Rp 7,637,000	Rp 4,311,000
214	Kupang	Manado	Rp 11,648,000	Rp 6,140,000
215	Kupang	Surabaya	Rp 6,749,000	Rp 3,722,000
216	Makassar	Biak	Rp 8,493,000	Rp 4,931,000
217	Makassar	Jayapura	Rp 10,193,000	Rp 5,787,000
218	Makassar	Kendari	Rp 2,663,000	Rp 1,786,000
219	Makassar	Manado	Rp 5,327,000	Rp 2,909,000
220	Makassar	Timika	Rp 11,723,000	Rp 6,567,000
221	Malang	Balikpapan	Rp 10,108,000	Rp 5,134,000
222	Malang	Banda Aceh	Rp 10,204,000	Rp 5,765,000
223	Malang	Banjarmasin	Rp 8,161,000	Rp 4,407,000
224	Malang	Batam	Rp 7,819,000	Rp 4,311,000
225	Malang	Biak	Rp 16,087,000	Rp 8,482,000
226	Malang	Jayapura	Rp 16,536,000	Rp 9,092,000
227	Malang	Kendari	Rp 10,322,000	Rp 5,487,000
228	Malang	Makassar	Rp 10,129,000	Rp 5,166,000
229	Malang	Manado	Rp 13,167,000	Rp 6,311,000
230	Malang	Medan	Rp 9,958,000	Rp 5,145,000
231	Malang	Padang	Rp 8,418,000	Rp 4,385,000
232	Malang	Palangkaraya	Rp 7,915,000	Rp 4,407,000
233	Malang	Palembang	Rp 6,899,000	Rp 3,765,000
234	Malang	Pekanbaru	Rp 8,461,000	Rp 4,439,000
235	Malang	Samarinda	Rp 10,108,000	Rp 5,134,000
236	Malang	Timika	Rp 15,873,000	Rp 8,461,000
237	Manado	Medan	Rp 15,552,000	Rp 7,316,000
238	Manado	Padang	Rp 14,012,000	Rp 6,546,000
239	Manado	Palembang	Rp 12,504,000	Rp 5,926,000
240	Manado	Pekanbaru	Rp 14,055,000	Rp 6,599,000
241	Manado	Pontianak	Rp 12,953,000	Rp 6,396,000
242	Manado	Semarang	Rp 12,504,000	Rp 5,851,000
243	Manado	Solo	Rp 12,504,000	Rp 5,990,000
244	Manado	Surabaya	Rp 9,937,000	Rp 5,262,000
245	Manado	Timika	Rp 16,183,000	Rp 8,995,000
246	Mataram	Balikpapan	Rp 10,750,000	Rp 5,615,000
247	Mataram	Banda Aceh	Rp 10,845,000	Rp 6,246,000
248	Mataram	Banjarmasin	Rp 8,803,000	Rp 4,888,000
249	Mataram	Batam	Rp 8,461,000	Rp 4,803,000
250	Mataram	Biak	Rp 11,552,000	Rp 6,546,000
251	Mataram	Jayapura	Rp 13,092,000	Rp 7,327,000
252	Mataram	Yogyakarta	Rp 4,417,000	Rp 2,781,000
253	Mataram	Makassar	Rp 4,717,000	Rp 2,909,000
254	Mataram	Manado	Rp 8,717,000	Rp 4,738,000
255	Mataram	Medan	Rp 10,600,000	Rp 5,637,000
256	Mataram	Padang	Rp 9,060,000	Rp 4,867,000
257	Mataram	Palembang	Rp 7,551,000	Rp 4,246,000
258	Mataram	Pekanbaru	Rp 9,102,000	Rp 4,909,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
259	Mataram	Pontianak	Rp	8,001,000	Rp	4,706,000
260	Mataram	Samarinda	Rp	10,750,000	Rp	5,615,000
261	Mataram	Surabaya	Rp	3,829,000	Rp	2,321,000
262	Medan	Banda Aceh	Rp	3,466,000	Rp	2,193,000
263	Medan	Makassar	Rp	12,514,000	Rp	6,172,000
264	Medan	Pontianak	Rp	9,733,000	Rp	5,230,000
265	Medan	Semarang	Rp	9,284,000	Rp	4,696,000
266	Medan	Solo	Rp	9,284,000	Rp	4,835,000
267	Medan	Surabaya	Rp	10,739,000	Rp	5,134,000
268	Medan	Timika	Rp	18,258,000	Rp	9,455,000
269	Padang	Makassar	Rp	10,974,000	Rp	5,402,000
270	Padang	Pontianak	Rp	8,193,000	Rp	4,460,000
271	Padang	Semarang	Rp	7,744,000	Rp	3,925,000
272	Padang	Solo	Rp	7,744,000	Rp	4,065,000
273	Padang	Surabaya	Rp	9,199,000	Rp	4,364,000
274	Padang	Timika	Rp	16,718,000	Rp	8,685,000
275	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp	10,546,000	Rp	6,022,000
276	Palangkaraya	Batam	Rp	8,161,000	Rp	4,578,000
277	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp	7,477,000	Rp	4,022,000
278	Palangkaraya	Mataram	Rp	8,557,000	Rp	4,888,000
279	Palangkaraya	Medan	Rp	10,300,000	Rp	5,412,000
280	Palangkaraya	Padang	Rp	8,760,000	Rp	4,642,000
281	Palangkaraya	Palembang	Rp	7,252,000	Rp	4,022,000
282	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp	8,803,000	Rp	4,696,000
283	Palangkaraya	Semarang	Rp	7,252,000	Rp	3,947,000
284	Palangkaraya	Solo	Rp	7,252,000	Rp	4,086,000
285	Palangkaraya	Surabaya	Rp	8,696,000	Rp	4,385,000
286	Palembang	Balikpapan	Rp	9,894,000	Rp	5,220,000
287	Palembang	Makassar	Rp	9,466,000	Rp	4,781,000
288	Palembang	Pontianak	Rp	6,685,000	Rp	3,840,000
289	Palembang	Semarang	Rp	6,236,000	Rp	3,305,000
290	Palembang	Solo	Rp	6,236,000	Rp	3,444,000
291	Palembang	Surabaya	Rp	7,690,000	Rp	3,744,000
292	Palembang	Timika	Rp	15,210,000	Rp	8,076,000
293	Palu	Makassar	Rp	4,268,000	Rp	2,578,000
294	Palu	Poso	Rp	1,957,000	Rp	1,423,000
295	Palu	Sorong	Rp	6,878,000	Rp	3,883,000
296	Palu	Surabaya	Rp	6,878,000	Rp	3,883,000
297	Palu	Toli-Toli	Rp	2,941,000	Rp	1,915,000
298	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp	9,038,000	Rp	4,631,000
299	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp	7,091,000	Rp	3,915,000
300	Pangkal Pinang	Batam	Rp	6,739,000	Rp	3,818,000
301	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp	6,065,000	Rp	3,262,000
302	Pangkal Pinang	Makassar	Rp	9,060,000	Rp	4,663,000
303	Pangkal Pinang	Manado	Rp	12,097,000	Rp	5,808,000
304	Pangkal Pinang	Medan	Rp	8,888,000	Rp	4,653,000
305	Pangkal Pinang	Padang	Rp	7,337,000	Rp	3,883,000
306	Pangkal Pinang	Palembang	Rp	5,829,000	Rp	3,262,000
307	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp	7,391,000	Rp	3,936,000
308	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp	6,279,000	Rp	3,733,000
309	Pangkal Pinang	Samarinda	Rp	9,038,000	Rp	4,631,000
310	Pangkal Pinang	Semarang	Rp	5,829,000	Rp	3,187,000
311	Pangkal Pinang	Solo	Rp	5,829,000	Rp	3,326,000
312	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp	7,284,000	Rp	3,626,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
313	Pekanbaru	Pontianak	Rp 8,247,000	Rp 4,514,000
314	Pekanbaru	Semarang	Rp 7,797,000	Rp 3,979,000
315	Pekanbaru	Solo	Rp 7,797,000	Rp 4,118,000
316	Pekanbaru	Surabaya	Rp 9,241,000	Rp 4,407,000
317	Pekanbaru	Timika	Rp 16,771,000	Rp 8,739,000
318	Pontianak	Makassar	Rp 9,915,000	Rp 5,241,000
319	Pontianak	Semarang	Rp 6,685,000	Rp 3,765,000
320	Pontianak	Solo	Rp 6,685,000	Rp 3,904,000
321	Pontianak	Surabaya	Rp 8,140,000	Rp 4,204,000
322	Pontianak	Timika	Rp 15,659,000	Rp 8,535,000
323	Samarinda	Banda Aceh	Rp 12,739,000	Rp 6,749,000
324	Samarinda	Batam	Rp 10,354,000	Rp 5,305,000
325	Samarinda	Denpasar	Rp 10,739,000	Rp 5,648,000
326	Samarinda	Jayapura	Rp 19,071,000	Rp 10,086,000
327	Samarinda	Yogyakarta	Rp 9,669,000	Rp 4,749,000
328	Samarinda	Makassar	Rp 12,664,000	Rp 6,150,000
329	Samarinda	Manado	Rp 15,702,000	Rp 7,295,000
330	Samarinda	Medan	Rp 12,493,000	Rp 6,140,000
331	Samarinda	Padang	Rp 10,942,000	Rp 5,369,000
332	Samarinda	Palembang	Rp 9,445,000	Rp 4,749,000
333	Samarinda	Pekanbaru	Rp 10,996,000	Rp 5,423,000
334	Samarinda	Semarang	Rp 9,445,000	Rp 4,674,000
335	Samarinda	Solo	Rp 9,445,000	Rp 4,813,000
336	Samarinda	Surabaya	Rp 10,889,000	Rp 5,113,000
337	Samarinda	Timika	Rp 18,408,000	Rp 9,445,000
338	Samarinda	Jakarta	Rp 7,412,000	Rp 3,797,000
339	Semarang	Makassar	Rp 9,466,000	Rp 4,706,000
340	Solo	Makassar	Rp 9,466,000	Rp 4,845,000
341	Surabaya	Denpasar	Rp 3,198,000	Rp 1,979,000
342	Surabaya	Jayapura	Rp 12,675,000	Rp 7,231,000
343	Surabaya	Makassar	Rp 5,936,000	Rp 3,433,000
344	Surabaya	Timika	Rp 11,295,000	Rp 6,589,000

Catatan:

Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, bagasi, dan biaya retribusi lainnya

B. SATUAN BIAYA TAKSI SEKALI JALAN (ONE WAY)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang / Kali	Rp 127,000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	Rp 308,000
3.	RIAU	Orang / Kali	Rp 101,000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	Rp 165,000
5.	J A M B I	Orang / Kali	Rp 147,000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	Rp 190,000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	Rp 179,000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	Rp 168,000
9.	BENGKULU	Orang / Kali	Rp 109,000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	Rp 97,000
11.	BANTEN	Orang / Kali	Rp 536,000
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	Rp 200,000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	Rp 256,000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	Rp 108,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp 267,000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	Rp 233,000
17.	B A L I	Orang / Kali	Rp 227,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	Rp 231,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	Rp 116,000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	Rp 171,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	Rp 134,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	Rp 180,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	Rp 533,000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	Rp 218,000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	Rp 138,000
26.	GORONTALO	Orang / Kali	Rp 265,000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	Rp 313,000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	Rp 187,000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	Rp 165,000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	Rp 171,000
31.	MALUKU	Orang / Kali	Rp 288,000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	Rp 215,000
33.	PAPUA	Orang / Kali	Rp 513,000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	Rp 236,000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Kali	Rp 236,000
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Kali	Rp 513,000
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Kali	Rp 513,000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Kali	Rp 513,000

Keterangan:

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari termpat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju termpat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang / Kali	Rp 275,000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang / Kali	Rp 298,000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang / Kali	Rp 183,000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang / Kali	Rp 238,000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang / Kali	Rp 325,000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang / Kali	Rp 420,000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang / Kali	Rp 315,000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang / Kali	Rp 293,000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang / Kali	Rp 460,000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang / Kali	Rp 289,000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang / Kali	Rp 270,000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang / Kali	Rp 278,000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang / Kali	Rp 220,000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	Rp 370,000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang / Kali	Rp 275,000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang / Kali	Rp 190,000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang / Kali	Rp 205,000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang / Kali	Rp 301,000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang / Kali	Rp 240,000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang / Kali	Rp 400,000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang / Kali	Rp 259,000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang / Kali	Rp 225,000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang / Kali	Rp 270,000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang / Kali	Rp 186,000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang / Kali	Rp 300,000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang / Kali	Rp 200,000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang / Kali	Rp 287,000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang / Kali	Rp 360,000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang / Kali	Rp 300,000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang / Kali	Rp 186,000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang / Kali	Rp 420,000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang / Kali	Rp 420,000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang / Kali	Rp 420,000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang / Kali	Rp 300,000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang / Kali	Rp 330,000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang / Kali	Rp 200,000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang / Kali	Rp 264,000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang / Kali	Rp 328,000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang / Kali	Rp 345,000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang / Kali	Rp 330,000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang / Kali	Rp 300,000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang / Kali	Rp 180,000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang / Kali	Rp 225,000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang / Kali	Rp 345,000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang / Kali	Rp 285,000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	Rp 203,000
RIAU				
47.	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir	Orang / Kali	Rp 380,000
48.	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hulu	Orang / Kali	Rp 315,000
49.	Pekan Baru	Kab. Kampar	Orang / Kali	Rp 200,000
50.	Pekan Baru	Kab. Kuantan Singingi	Orang / Kali	Rp 300,000

51.	Pekan Baru	Kab. Pelalawan	Orang / Kali	Rp 225,000
52.	Pekan Baru	Kab. Rokan Hilir	Orang / Kali	Rp 350,000
53.	Pekan Baru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp 322,000
54.	Pekan Baru	Kab. Siak	Orang / Kali	Rp 350,000
55.	Pekan Baru	Kota Dumai	Orang / Kali	Rp 400,000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang / Kali	Rp 185,000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang / Kali	Rp 175,000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang / Kali	Rp 270,000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang / Kali	Rp 325,000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang / Kali	Rp 260,000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang / Kali	Rp 170,000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang / Kali	Rp 241,000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	Rp 225,000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang / Kali	Rp 190,000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang / Kali	Rp 250,000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang / Kali	Rp 308,000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang / Kali	Rp 225,000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang / Kali	Rp 250,000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp 225,000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang / Kali	Rp 205,000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang / Kali	Rp 250,000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang / Kali	Rp 250,000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang / Kali	Rp 205,000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang / Kali	Rp 225,000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang / Kali	Rp 210,000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang / Kali	Rp 250,000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang / Kali	Rp 220,000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang / Kali	Rp 215,000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang / Kali	Rp 210,000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang / Kali	Rp 200,000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang / Kali	Rp 225,000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang / Kali	Rp 215,000
83.	Padang	Kota Solok	Orang / Kali	Rp 210,000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang / Kali	Rp 203,000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang / Kali	Rp 315,000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang / Kali	Rp 250,000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang / Kali	Rp 235,000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang / Kali	Rp 235,000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang / Kali	Rp 320,000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang / Kali	Rp 325,000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang / Kali	Rp 205,000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang / Kali	Rp 205,000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang / Kali	Rp 248,000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang / Kali	Rp 250,000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang / Kali	Rp 245,000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang / Kali	Rp 265,000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang / Kali	Rp 290,000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang / Kali	Rp 280,000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang / Kali	Rp 205,000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang / Kali	Rp 270,000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang / Kali	Rp 234,000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang / Kali	Rp 246,000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang / Kali	Rp 246,000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang / Kali	Rp 252,000

105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang / Kali	Rp	276,000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang / Kali	Rp	216,000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang / Kali	Rp	200,000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang / Kali	Rp	222,000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang / Kali	Rp	240,000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang / Kali	Rp	252,000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang / Kali	Rp	267,000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang / Kali	Rp	270,000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang / Kali	Rp	234,000
BENGKULU					
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang / Kali	Rp	344,000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang / Kali	Rp	232,000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang / Kali	Rp	313,000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang / Kali	Rp	385,000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang / Kali	Rp	298,000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang / Kali	Rp	375,000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang / Kali	Rp	423,000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang / Kali	Rp	313,000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang / Kali	Rp	282,000
BANGKA BELITUNG					
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang / Kali	Rp	250,000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang / Kali	Rp	275,000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang / Kali	Rp	275,000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang / Kali	Rp	250,000
BANTEN					
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang / Kali	Rp	208,000
128.	Serang	Kab. Pandegiang	Orang / Kali	Rp	138,000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang / Kali	Rp	160,000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang / Kali	Rp	254,000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang / Kali	Rp	160,000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang / Kali	Rp	313,000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp	347,000
JAWA BARAT					
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang / Kali	Rp	183,000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang / Kali	Rp	275,000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang / Kali	Rp	265,000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang / Kali	Rp	185,000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang / Kali	Rp	245,000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang / Kali	Rp	215,000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang / Kali	Rp	280,000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	Rp	243,000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang / Kali	Rp	275,000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang / Kali	Rp	248,000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	Rp	275,000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang / Kali	Rp	235,000
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang / Kali	Rp	283,000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang / Kali	Rp	218,000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang / Kali	Rp	208,000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang / Kali	Rp	245,000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang / Kali	Rp	230,000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang / Kali	Rp	245,000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang / Kali	Rp	283,000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang / Kali	Rp	265,000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang / Kali	Rp	285,000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang / Kali	Rp	168,000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang / Kali	Rp	270,000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang / Kali	Rp	275,000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	Rp	226,000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang / Kali	Rp	245,000

	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	Rp 260,000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang / Kali	Rp 257,000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang / Kali	Rp 240,000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang / Kali	Rp 270,000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang / Kali	Rp 240,000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang / Kali	Rp 263,000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang / Kali	Rp 280,000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang / Kali	Rp 230,000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang / Kali	Rp 235,000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang / Kali	Rp 240,000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang / Kali	Rp 250,000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang / Kali	Rp 260,000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang / Kali	Rp 230,000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang / Kali	Rp 250,000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang / Kali	Rp 235,000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang / Kali	Rp 240,000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang / Kali	Rp 240,000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang / Kali	Rp 245,000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang / Kali	Rp 250,000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang / Kali	Rp 270,000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang / Kali	Rp 250,000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang / Kali	Rp 250,000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang / Kali	Rp 230,000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang / Kali	Rp 250,000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang / Kali	Rp 250,000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang / Kali	Rp 260,000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang / Kali	Rp 240,000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang / Kali	Rp 250,000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang / Kali	Rp 250,000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang / Kali	Rp 240,000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang / Kali	Rp 245,000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	Rp 235,000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	Rp 245,000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	Rp 260,000
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang / Kali	Rp 250,000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang / Kali	Rp 350,000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	Rp 350,000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang / Kali	Rp 200,000
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	Rp 225,000
199.	Surabaya	Kab. Banl.uwangi	Orang / Kali	Rp 285,000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang / Kali	Rp 255,000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang / Kali	Rp 225,000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang / Kali	Rp 255,000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang / Kali	Rp 225,000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang / Kali	Rp 261,000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang / Kali	Rp 235,000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang / Kali	Rp 235,000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang / Kali	Rp 225,000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	Rp 261,000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang / Kali	Rp 245,000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang / Kali	Rp 253,000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang / Kali	Rp 228,000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang / Kali	Rp 225,000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang / Kali	Rp 245,000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang / Kali	Rp 253,000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang / Kali	Rp 285,000

216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang / Kali	Rp	243,000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang / Kali	Rp	228,000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang / Kali	Rp	255,000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang / Kali	Rp	228,000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang / Kali	Rp	235,000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang / Kali	Rp	240,000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang / Kali	Rp	255,000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang / Kali	Rp	255,000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang / Kali	Rp	245,000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang / Kali	Rp	245,000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang / Kali	Rp	245,000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang / Kali	Rp	242,000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang / Kali	Rp	255,000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang / Kali	Rp	225,000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang / Kali	Rp	235,000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang / Kali	Rp	245,000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang / Kali	Rp	228,000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang / Kali	Rp	225,000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang / Kali	Rp	228,000
BALI					
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang / Kali	Rp	188,000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang / Kali	Rp	225,000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang / Kali	Rp	265,000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang / Kali	Rp	225,000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang / Kali	Rp	270,000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang / Kali	Rp	263,000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang / Kali	Rp	225,000
NUSA TENGGARA BARAT					
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang / Kali	Rp	325,000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang / Kali	Rp	450,000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang / Kali	Rp	350,000
NUSA TENGGARA TIMUR					
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang / Kali	Rp	325,000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang / Kali	Rp	175,000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	Rp	218,000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang / Kali	Rp	275,000
KALIMANTAN BARAT					
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang / Kali	Rp	270,000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang / Kali	Rp	550,000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang / Kali	Rp	550,000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang / Kali	Rp	550,000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	Rp	185,000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang / Kali	Rp	270,000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang / Kali	Rp	430,000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang / Kali	Rp	230,000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang / Kali	Rp	300,000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang / Kali	Rp	303,000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang / Kali	Rp	343,000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang / Kali	Rp	392,000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang / Kali	Rp	257,000
KALIMANTAN TENGAH					
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang / Kali	Rp	290,000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang / Kali	Rp	333,000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang / Kali	Rp	425,000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	Rp	300,000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang / Kali	Rp	275,000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang / Kali	Rp	250,000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang / Kali	Rp	425,000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang / Kali	Rp	300,000

270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang / Kali	Rp	525,000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang / Kali	Rp	448,000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang / Kali	Rp	250,000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang / Kali	Rp	328,000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang / Kali	Rp	525,000
KALIMANTAN SELATAN					
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang / Kali	Rp	230,000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang / Kali	Rp	170,000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang / Kali	Rp	200,000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang / Kali	Rp	200,000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang / Kali	Rp	212,000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang / Kali	Rp	218,000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang / Kali	Rp	290,000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang / Kali	Rp	234,000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang / Kali	Rp	300,000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang / Kali	Rp	200,000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang / Kali	Rp	189,000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang / Kali	Rp	225,000
SULAWESI UTARA					
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang / Kali	Rp	250,000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang / Kali	Rp	275,000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang / Kali	Rp	250,000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang / Kali	Rp	300,000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang / Kali	Rp	180,000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang / Kali	Rp	180,000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang / Kali	Rp	200,000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang / Kali	Rp	175,000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang / Kali	Rp	175,000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang / Kali	Rp	250,000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang / Kali	Rp	170,000
GORONTALO					
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang / Kali	Rp	400,000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang / Kali	Rp	300,000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang / Kali	Rp	350,000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang / Kali	Rp	650,000
SULAWESI BARAT					
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang / Kali	Rp	240,000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang / Kali	Rp	359,000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang / Kali	Rp	200,000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang / Kali	Rp	270,000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang / Kali	Rp	260,000
SULAWESI SELATAN					
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang / Kali	Rp	235,000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang / Kali	Rp	210,000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang / Kali	Rp	240,000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang / Kali	Rp	240,000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang / Kali	Rp	250,000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang / Kali	Rp	175,000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang / Kali	Rp	230,000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang / Kali	Rp	350,000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang / Kali	Rp	375,000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang / Kali	Rp	365,000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang / Kali	Rp	170,000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang / Kali	Rp	230,000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang / Kali	Rp	230,000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang / Kali	Rp	235,000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang / Kali	Rp	235,000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang / Kali	Rp	190,000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang / Kali	Rp	350,000

331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang / Kali	Rp 350,000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang / Kali	Rp 230,000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang / Kali	Rp 350,000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang / Kali	Rp 225,000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang / Kali	Rp 400,000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang / Kali	Rp 472,000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang / Kali	Rp 130,000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang / Kali	Rp 400,000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang / Kali	Rp 400,000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang / Kali	Rp 250,000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang / Kali	Rp 280,000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang / Kali	Rp 219,000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	Rp 350,000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang / Kali	Rp 412,000
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang / Kali	Rp 355,000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang / Kali	Rp 370,000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang / Kali	Rp 300,000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang / Kali	Rp 425,000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang / Kali	Rp 300,000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang / Kali	Rp 305,000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang / Kali	Rp 300,000
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang / Kali	Rp 850,000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang / Kali	Rp 1,000,000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang / Kali	Rp 1,250,000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang / Kali	Rp 900,000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang / Kali	Rp 600,000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang / Kali	Rp 900,000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang / Kali	Rp 2,700,000
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang / Kali	Rp 1,134,000
PAPUA BARAT				
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang / Kali	Rp 900,000
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang / Kali	Rp 750,000
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang / Kali	Rp 2,650,000
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang / Kali	Rp 1,000,000

D. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II, JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA DAN UTAMA SERTA PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, I/II, PPPK, PEGAWAI NON ASN DAN PIHAK LAIN
			TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 4,420,000	Rp 3,526,000	Rp 1,533,000	Rp 770,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4,960,000	Rp 2,195,000	Rp 1,100,000	Rp 699,000
3.	RIAU	OH	Rp 3,820,000	Rp 3,119,000	Rp 1,650,000	Rp 852,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5,344,000	Rp 2,318,000	Rp 1,297,000	Rp 792,000
5.	J A M B I	OH	Rp 5,000,000	Rp 4,102,000	Rp 1,225,000	Rp 580,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5,236,000	Rp 3,332,000	Rp 1,353,000	Rp 701,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5,850,000	Rp 3,083,000	Rp 1,955,000	Rp 861,000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4,491,000	Rp 2,488,000	Rp 1,425,000	Rp 580,000
9.	BENGKULU	OH	Rp 2,140,000	Rp 1,628,000	Rp 1,546,000	Rp 692,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3,827,000	Rp 2,838,000	Rp 1,957,000	Rp 649,000
11.	BANTEN	OH	Rp 5,725,000	Rp 2,373,000	Rp 1,204,000	Rp 724,000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5,381,000	Rp 2,755,000	Rp 1,201,000	Rp 686,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8,720,000	Rp 2,063,000	Rp 992,000	Rp 730,000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 5,303,000	Rp 1,850,000	Rp 1,201,000	Rp 750,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5,017,000	Rp 2,695,000	Rp 1,384,000	Rp 845,000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4,449,000	Rp 2,007,000	Rp 1,153,000	Rp 814,000
17.	B A L I	OH	Rp 6,848,000	Rp 2,433,000	Rp 1,685,000	Rp 1,138,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4,375,000	Rp 2,648,000	Rp 1,418,000	Rp 907,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3,750,000	Rp 2,133,000	Rp 1,355,000	Rp 688,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2,654,000	Rp 1,923,000	Rp 1,125,000	Rp 538,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4,901,000	Rp 3,391,000	Rp 1,160,000	Rp 659,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4,797,000	Rp 3,316,000	Rp 1,500,000	Rp 697,000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4,000,000	Rp 2,735,000	Rp 1,507,000	Rp 904,000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4,919,000	Rp 2,290,000	Rp 1,207,000	Rp 978,000
25.	GORONTALO	OH	Rp 4,168,000	Rp 3,107,000	Rp 1,606,000	Rp 955,000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4,076,000	Rp 3,098,000	Rp 1,344,000	Rp 704,000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4,820,000	Rp 1,938,000	Rp 1,423,000	Rp 745,000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2,309,000	Rp 2,027,000	Rp 1,679,000	Rp 951,000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3,088,800	Rp 2,574,000	Rp 1,297,000	Rp 786,000
30.	MALUKU	OH	Rp 3,467,000	Rp 3,240,000	Rp 1,059,000	Rp 667,000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp 4,611,600	Rp 3,843,000	Rp 1,160,000	Rp 605,000
32.	PAPUA	OH	Rp 3,859,000	Rp 3,318,000	Rp 2,521,000	Rp 1,038,000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3,872,000	Rp 3,341,000	Rp 2,056,000	Rp 967,000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3,872,000	Rp 3,341,000	Rp 2,056,000	Rp 967,000
35.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3,859,000	Rp 3,318,000	Rp 2,521,000	Rp 1,038,000
36.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5,673,000	Rp 4,877,000	Rp 3,706,000	Rp 1,526,000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5,711,000	Rp 4,911,000	Rp 3,731,000	Rp 1,536,000

2. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II, JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA DAN UTAMA SERTA PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, I/II, PPPK, PEGAWAI NON ASN DAN PIHAK LAIN
			TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D
1.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000

E. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

1. UANG HARIAN DI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3.	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5.	J A M B I	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
17.	B A L I	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
25.	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
30.	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
32.	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
35.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
36.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000	Rp 170.000

2. UANG HARIAN LUAR DAERAH DI DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
1.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000

F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000

G. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp 453,000	Rp 663,000	Rp 1,732,000	Rp 1,116,000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 451,000	Rp 675,000	Rp 1,350,000	Rp 1,126,000
3.	RIAU	OP	Rp 319,000	Rp 582,000	Rp 1,229,000	Rp 901,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 471,000	Rp 634,000	Rp 1,484,000	Rp 1,105,000
5.	J A M B I	OP	Rp 465,000	Rp 595,000	Rp 1,538,000	Rp 1,060,000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 351,000	Rp 502,000	Rp 1,492,000	Rp 853,000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 489,000	Rp 718,000	Rp 1,448,000	Rp 1,207,000
8.	LAMPUNG	OP	Rp 452,000	Rp 577,000	Rp 1,200,000	Rp 1,029,000
9.	BENGKULU	OP	Rp 383,000	Rp 538,000	Rp 1,262,000	Rp 921,000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 555,000	Rp 714,000	Rp 1,632,000	Rp 1,269,000
11.	BANTEN	OP	Rp 678,000	Rp 930,000	Rp 1,752,000	Rp 1,608,000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 567,000	Rp 799,000	Rp 1,914,000	Rp 1,366,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 760,000	Rp 993,000	Rp 2,257,000	Rp 1,753,000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 426,000	Rp 738,000	Rp 1,576,000	Rp 1,164,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 458,000	Rp 607,000	Rp 1,470,000	Rp 1,065,000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 442,000	Rp 710,000	Rp 2,159,000	Rp 1,152,000
17.	B A L I	OP	Rp 737,000	Rp 907,000	Rp 2,523,000	Rp 1,644,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 503,000	Rp 800,000	Rp 1,413,000	Rp 1,303,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 642,000	Rp 1,046,000	Rp 2,013,000	Rp 1,688,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 462,000	Rp 617,000	Rp 1,247,000	Rp 1,079,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 455,000	Rp 679,000	Rp 2,092,000	Rp 1,134,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 380,000	Rp 545,000	Rp 1,340,900	Rp 925,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 423,000	Rp 750,000	Rp 1,250,000	Rp 1,173,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 393,000	Rp 722,700	Rp 1,763,300	Rp 1,115,700
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 490,000	Rp 620,000	Rp 1,250,000	Rp 1,110,000
26.	GORONTALO	OP	Rp 390,000	Rp 562,000	Rp 2,296,800	Rp 952,000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 390,000	Rp 574,000	Rp 1,301,000	Rp 964,000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 403,000	Rp 583,000	Rp 2,218,000	Rp 986,000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 440,000	Rp 652,000	Rp 1,672,000	Rp 1,092,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 510,000	Rp 552,000	Rp 1,335,000	Rp 949,000
31.	MALUKU	OP	Rp 463,000	Rp 638,000	Rp 1,881,000	Rp 1,101,000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 575,000	Rp 693,000	Rp 1,220,000	Rp 1,268,000
33.	PAPUA	OP	Rp 482,000	Rp 768,000	Rp 2,063,000	Rp 1,250,000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 503,000	Rp 728,000	Rp 1,952,000	Rp 1,231,000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 503,000	Rp 728,000	Rp 1,952,000	Rp 1,231,000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp 482,000	Rp 768,000	Rp 2,063,000	Rp 1,250,000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp 709,000	Rp 1,129,000	Rp 3,033,000	Rp 1,838,000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 739,000	Rp 1,070,000	Rp 2,869,000	Rp 1,809,000

Keterangan:

1. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.
2. Untuk akomodasi paket fullboard pejabat eselon II yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
3. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
4. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

**H. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp 413,000	Rp 575,000	Rp 1,075,000	Rp 988,000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 411,000	Rp 511,000	Rp 1,011,000	Rp 922,000
3.	RIAU	OP	Rp 279,000	Rp 432,000	Rp 1,084,000	Rp 711,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 431,000	Rp 531,000	Rp 1,170,000	Rp 962,000
5.	J A M B I	OP	Rp 425,000	Rp 525,000	Rp 1,298,000	Rp 950,000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 311,000	Rp 432,000	Rp 987,000	Rp 743,000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 391,000	Rp 502,000	Rp 1,030,000	Rp 893,000
8.	LAMPUNG	OP	Rp 421,000	Rp 512,000	Rp 950,000	Rp 933,000
9.	BENGKULU	OP	Rp 343,000	Rp 468,000	Rp 1,062,000	Rp 811,000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 449,000	Rp 582,000	Rp 1,115,000	Rp 1,031,000
11.	BANTEN	OP	Rp 502,000	Rp 632,000	Rp 1,201,000	Rp 1,134,000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 474,000	Rp 692,000	Rp 1,110,000	Rp 1,166,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 542,000	Rp 667,000	Rp 1,347,000	Rp 1,209,000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 3,030,000	Rp 474,000	Rp 919,000	Rp 777,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 332,000	Rp 507,000	Rp 1,204,000	Rp 839,000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 398,000	Rp 623,000	Rp 1,784,000	Rp 1,021,000
17.	B A L I	OP	Rp 488,000	Rp 652,000	Rp 1,569,000	Rp 1,140,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 488,000	Rp 713,000	Rp 1,213,000	Rp 1,201,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 463,000	Rp 602,000	Rp 1,294,000	Rp 1,065,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 422,000	Rp 547,000	Rp 1,047,000	Rp 969,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 415,000	Rp 609,000	Rp 1,902,000	Rp 1,024,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 340,000	Rp 457,000	Rp 1,219,000	Rp 815,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 324,000	Rp 478,000	Rp 1,050,000	Rp 802,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 373,000	Rp 657,000	Rp 1,603,000	Rp 1,030,000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 450,000	Rp 550,000	Rp 1,050,000	Rp 1,000,000
26.	GORONTALO	OP	Rp 350,000	Rp 492,000	Rp 2,088,000	Rp 842,000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 350,000	Rp 504,000	Rp 1,101,000	Rp 854,000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 363,000	Rp 513,000	Rp 1,574,000	Rp 876,000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 400,000	Rp 582,000	Rp 1,520,000	Rp 982,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 464,000	Rp 604,000	Rp 1,171,000	Rp 1,068,000
31.	MALUKU	OP	Rp 423,000	Rp 568,000	Rp 1,710,000	Rp 991,000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 523,000	Rp 623,000	Rp 1,050,000	Rp 1,146,000
33.	PAPUA	OP	Rp 442,000	Rp 698,000	Rp 1,863,000	Rp 1,140,000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 463,000	Rp 658,000	Rp 1,752,000	Rp 1,121,000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 463,000	Rp 658,000	Rp 1,752,000	Rp 1,121,000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp 442,000	Rp 698,000	Rp 1,863,000	Rp 1,140,000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp 650,000	Rp 1,026,000	Rp 2,739,000	Rp 1,676,000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 650,000	Rp 1,026,000	Rp 2,739,000	Rp 1,676,000

Keterangan:

1. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.
2. Untuk akomodasi paket fullboard pejabat eselon II yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
3. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
4. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

I. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
3.	RIAU	OH	Rp 130,000	Rp 85,000	Rp 130,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
5.	J A M B I	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
9.	BENGKULU	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
11.	BANTEN	OH	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 180,000	Rp 130,000	Rp 180,000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 140,000	Rp 100,000	Rp 140,000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 140,000	Rp 100,000	Rp 140,000
17.	B A L I	OH	Rp 160,000	Rp 115,000	Rp 160,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140,000	Rp 100,000	Rp 140,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
26.	GORONTALO	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
31.	MALUKU	OH	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
33.	PAPUA	OH	Rp 200,000	Rp 140,000	Rp 200,000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 160,000	Rp 115,000	Rp 160,000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 160,000	Rp 115,000	Rp 160,000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 200,000	Rp 140,000	Rp 200,000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 200,000	Rp 140,000	Rp 200,000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 200,000	Rp 140,000	Rp 200,000

Keterangan:

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota dan kegiatan fullday / half day di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

J. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	TRANSPORTASI (PP)	CARTER (ONE WAY)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SANGATTA - BERAU	1,650,000	3,500,000
2	SANGATTA - MAHAKAM HULU	2,450,000	6,000,000
3	SANGATTA - KUTAI BARAT	1,150,000	4,400,000
4	SANGATTA - KUTAI KARTANEGARA	600,000	1,600,000
5	SANGATTA - BONTANG	300,000	650,000
6	SANGATTA - BALIKPAPAN	750,000	1,700,000
7	SANGATTA - SAMARINDA	600,000	1,500,000
8	SANGATTA - PASER	1,000,000	4,200,000
9	SANGATTA - PENAJAM PASER UTARA	850,000	3,300,000

Catatan :

- 1. Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi darat dan air/laut.
- 2. Biaya bantuan BBM perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas disesuaikan dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU atau bukti pembelian yang sah. Apabila tidak mendapatkan bukti yang sah maka melampirkan surat pernyataan rill.

K. PAKET BIAYA TRANSPORTASI UDARA DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	JALUR TRANSPORTASI	TINGKAT A (Kelas Bisnis)	TINGKAT B, C DAN D (Kelas Ekonomi)
		Pergi - Pulang (PP)	Pergi - Pulang (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SANGATTA - BERAU	3,731,000	2,906,000
2	SANGATTA - BALIKPAPAN	2,300,000	2,300,000

Catatan :

Paket Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara.

L. SEWA KENDARAAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SUV Jip 2500cc 4x4	Unit / Hari	2,750,000
2	SUV Dobel Kabin 2500cc 4x4	Unit / Hari	1,650,000
3	Inova/Terios	Unit / Hari	800,000
4	Avanza	Unit / Hari	500,000

Catatan :

- 1. Biaya sewa kendaraan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur digunakan hanya untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan insidentil yang digunakan untuk kebutuhan sifatnya tidak terus menerus.
- 2. Biaya bantuan BBM perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan sewa disesuaikan dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU atau bukti pembelian yang sah. Apabila tidak mendapatkan bukti yang sah maka melampirkan surat pernyataan rill.

M. BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	DARI	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 300,000
2	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300,000
3	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 284,000
4	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284,000
5	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp 428,000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 286,000
7	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 310,000
8	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 286,000
9	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275,000
10	Jakarta	Bandung (Reguler)	Orang/Kali	Rp 500,000
11	Jakarta	Bandung (Carter)	Orang/Kali	Rp 1,000,000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

A. BIAYA TIKET PESAWAT LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	ASAL	NEGARA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Chicago)	Rp 99,919,500	Rp 53,099,000
2	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Houston)	Rp 94,061,500	Rp 52,069,500
3	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Los Angeles)	Rp 85,912,500	Rp 47,009,000
4	JAKARTA	AMERIKA UTARA (New York)	Rp 89,595,500	Rp 55,665,500
5	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Ottawa)	Rp 100,398,000	Rp 59,203,500
6	JAKARTA	AMERIKA UTARA (San Fransisco)	Rp 103,501,000	Rp 43,311,500
7	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Toronto)	Rp 124,178,000	Rp 46,414,500
8	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Vancouver)	Rp 108,141,000	Rp 47,516,500
9	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Washington)	Rp 125,454,000	Rp 56,985,000
10	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Bogota)	Rp 136,677,000	Rp 111,838,500
11	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Brasilia)	Rp 167,011,000	Rp 86,565,000
12	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Boenos Aires)	Rp 221,850,000	Rp 150,800,000
13	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Caracas)	Rp 200,636,500	Rp 98,962,500
14	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Paramaribo)	Rp 137,663,000	Rp 106,618,500
15	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Santiago de Chile)	Rp 225,315,500	Rp 129,050,000
16	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Quito)	Rp 235,900,500	Rp 175,841,500
17	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Lima)	Rp 119,813,500	Rp 73,051,000
18	JAKARTA	AMERIKA TENGAH (Meksiko)	Rp 113,549,500	Rp 57,507,000
19	JAKARTA	AMERIKA TENGAH (Havana)	Rp 162,733,500	Rp 106,357,500
20	JAKARTA	AMERIKA TENGAH (Panama)	Rp 134,937,000	Rp 89,827,500
21	JAKARTA	EROPA BARAT (Vienna)	Rp 60,566,500	Rp 48,676,500
22	JAKARTA	EROPA BARAT (Brussel)	Rp 86,913,000	Rp 56,115,000
23	JAKARTA	EROPA BARAT (Marseille)	Rp 73,573,000	Rp 51,344,500
24	JAKARTA	EROPA BARAT (Paris)	Rp 88,232,500	Rp 48,299,500
25	JAKARTA	EROPA BARAT (Berlin)	Rp 88,827,000	Rp 57,405,500
26	JAKARTA	EROPA BARAT (Bern)	Rp 98,281,000	Rp 63,147,500
27	JAKARTA	EROPA BARAT (Bonn)	Rp 72,833,500	Rp 54,418,500
28	JAKARTA	EROPA BARAT (Hamburg)	Rp 110,765,500	Rp 59,566,000
29	JAKARTA	EROPA BARAT (Geneva)	Rp 77,865,000	Rp 62,828,500
30	JAKARTA	EROPA BARAT (Amsterdam)	Rp 85,521,000	Rp 48,299,500
31	JAKARTA	EROPA BARAT (Den Haag)	Rp 85,521,000	Rp 48,299,500
32	JAKARTA	EROPA BARAT (Frankfurt)	Rp 58,536,500	Rp 15,442,500
33	JAKARTA	EROPA UTARA (Kopenhagen)	Rp 71,340,000	Rp 54,085,000
34	JAKARTA	EROPA UTARA (Helsinki)	Rp 85,999,500	Rp 53,374,500
35	JAKARTA	EROPA UTARA (Stockholm)	Rp 79,837,000	Rp 49,778,500
36	JAKARTA	EROPA UTARA (London)	Rp 105,748,500	Rp 60,218,500
37	JAKARTA	EROPA UTARA (Oslo)	Rp 69,208,500	Rp 58,710,500
38	JAKARTA	EROPA SELATAN (Sarajevo)	Rp 103,370,500	Rp 87,478,500
39	JAKARTA	EROPA SELATAN (Zagreb)	Rp 147,566,500	Rp 75,139,000
40	JAKARTA	EROPA SELATAN (Athens)	Rp 134,212,000	Rp 116,594,500
41	JAKARTA	EROPA SELATAN (Lisbon)	Rp 68,817,000	Rp 49,053,500
42	JAKARTA	EROPA SELATAN (Madrid)	Rp 69,121,500	Rp 52,649,500

NO	ASAL	NEGARA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
43	JAKARTA	EROPA SELATAN (Roma)	Rp 87,000,000	Rp 65,250,000
44	JAKARTA	EROPA SELATAN (Beograd)	Rp 92,858,000	Rp 80,678,000
45	JAKARTA	EROPA SELATAN (Vatikan)	Rp 87,000,000	Rp 65,250,000
46	JAKARTA	EROPA TIMUR (Bratislava)	Rp 64,133,500	Rp 55,709,000
47	JAKARTA	EROPA TIMUR (Bucharest)	Rp 72,239,000	Rp 59,638,500
48	JAKARTA	EROPA TIMUR (Kiev)	Rp 87,420,500	Rp 75,298,500
49	JAKARTA	EROPA TIMUR (Moskow)	Rp 104,487,000	Rp 74,573,500
50	JAKARTA	EROPA TIMUR (Praha)	Rp 171,796,000	Rp 97,846,000
51	JAKARTA	EROPA TIMUR (Sofia)	Rp 92,017,000	Rp 52,374,000
52	JAKARTA	EROPA TIMUR (Warsawa)	Rp 73,254,000	Rp 49,981,500
53	JAKARTA	EROPA TIMUR (Budapest)	Rp 86,695,500	Rp 31,711,500
54	JAKARTA	AFRIKA BARAT (Dakkar)	Rp 142,796,000	Rp 124,047,500
55	JAKARTA	AFRIKA BARAT (Abuja)	Rp 113,796,000	Rp 98,861,000
56	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Addis Ababa)	Rp 84,216,000	Rp 80,504,000
57	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Nairobi)	Rp 115,507,000	Rp 88,174,500
58	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Antananarivo)	Rp 130,500,000	Rp 120,089,000
59	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Dar Es Salaam)	Rp 95,685,500	Rp 83,128,500
60	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Harare)	Rp 153,700,000	Rp 83,331,500
61	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Windhoek)	Rp 170,723,000	Rp 108,895,000
62	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Cape Town)	Rp 140,693,500	Rp 122,220,500
63	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Johannesburg)	Rp 142,129,000	Rp 104,632,000
64	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Maputo)	Rp 123,598,000	Rp 90,987,500
65	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Pretoria)	Rp 142,129,000	Rp 104,632,000
66	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Algiers)	Rp 95,598,500	Rp 82,795,000
67	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Kairo)	Rp 103,269,000	Rp 65,003,500
68	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Khartoum)	Rp 65,351,500	Rp 56,767,500
69	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Rabbat)	Rp 111,954,500	Rp 82,142,500
70	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Tripoli)	Rp 82,737,000	Rp 72,137,500
71	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Tunisia)	Rp 72,761,000	Rp 52,475,500
72	JAKARTA	ASIA BARAT (Manama)	Rp 89,233,000	Rp 69,991,500
73	JAKARTA	ASIA BARAT (Baghdad)	Rp 60,146,000	Rp 51,402,500
74	JAKARTA	ASIA BARAT (Amman)	Rp 93,249,500	Rp 51,402,500
75	JAKARTA	ASIA BARAT (Kuwait)	Rp 61,958,500	Rp 45,095,000
76	JAKARTA	ASIA BARAT (Beirut)	Rp 65,105,000	Rp 54,085,000
77	JAKARTA	ASIA BARAT (Doha)	Rp 52,765,500	Rp 39,802,500
78	JAKARTA	ASIA BARAT (Damaskus)	Rp 78,155,000	Rp 48,212,500
79	JAKARTA	ASIA BARAT (Ankara)	Rp 96,323,500	Rp 51,924,500
80	JAKARTA	ASIA BARAT (Abu Dhabi)	Rp 72,152,000	Rp 39,541,500
81	JAKARTA	ASIA BARAT (Sanaa)	Rp 85,231,000	Rp 53,345,500
82	JAKARTA	ASIA BARAT (Jeddah)	Rp 54,882,500	Rp 48,154,500
83	JAKARTA	ASIA BARAT (Muscat)	Rp 74,762,000	Rp 54,041,500
84	JAKARTA	ASIA BARAT (Riyadh)	Rp 50,895,000	Rp 43,500,000
85	JAKARTA	ASIA BARAT (Istanbul)	Rp 64,307,500	Rp 35,771,500
86	JAKARTA	ASIA BARAT (Dubai)	Rp 61,001,500	Rp 27,840,000
87	JAKARTA	ASIA TENGAH (Tashkent)	Rp 122,568,500	Rp 106,473,500
88	JAKARTA	ASIA TENGAH (Astana)	Rp 175,290,500	Rp 129,949,000
89	JAKARTA	ASIA TENGAH (Baku)	Rp 124,062,000	Rp 33,074,500
90	JAKARTA	ASIA TIMUR (Beijing)	Rp 31,030,000	Rp 23,533,500
91	JAKARTA	ASIA TIMUR (Hongkong)	Rp 38,178,500	Rp 18,226,500
92	JAKARTA	ASIA TIMUR (Osaka)	Rp 38,947,000	Rp 27,028,000
93	JAKARTA	ASIA TIMUR (Tokyo)	Rp 38,787,500	Rp 26,607,500
94	JAKARTA	ASIA TIMUR (Pyongyang)	Rp 32,190,000	Rp 24,070,000
95	JAKARTA	ASIA TIMUR (Seoul)	Rp 43,007,000	Rp 25,186,500

NO	ASAL	NEGARA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
96	JAKARTA	ASIA TIMUR (Shanghai)	Rp 39,860,500	Rp 18,908,000
97	JAKARTA	ASIA TIMUR (Guangzhou)	Rp 39,860,500	Rp 18,908,000
98	JAKARTA	ASIA SELATAN (Kabul)	Rp 56,622,500	Rp 46,516,000
99	JAKARTA	ASIA SELATAN (Teheran)	Rp 66,700,000	Rp 46,400,000
100	JAKARTA	ASIA SELATAN (Kolombo)	Rp 37,149,000	Rp 23,606,000
101	JAKARTA	ASIA SELATAN (Dhaka)	Rp 35,046,500	Rp 15,834,000
102	JAKARTA	ASIA SELATAN (Islamabad)	Rp 48,328,500	Rp 36,264,500
103	JAKARTA	ASIA SELATAN (Karachi)	Rp 52,678,500	Rp 33,654,500
104	JAKARTA	ASIA SELATAN (New Delhi)	Rp 36,250,000	Rp 21,750,000
105	JAKARTA	ASIA SELATAN (Mumbai)	Rp 35,046,500	Rp 15,834,000
106	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Bandar Seri Bagawan)	Rp 16,631,500	Rp 13,325,500
107	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Bangkok)	Rp 16,747,500	Rp 11,933,500
108	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Davao City)	Rp 37,091,000	Rp 23,794,500
109	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Dilli)	Rp 7,119,500	Rp 5,075,000
110	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Hanoi)	Rp 26,578,500	Rp 24,012,000
111	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Ho Chi Minh)	Rp 21,793,500	Rp 17,907,500
112	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Johor Bahru)	Rp 13,209,500	Rp 7,612,500
113	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Kota Kinabalu)	Rp 20,691,500	Rp 10,063,000
114	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Kuala Lumpur)	Rp 9,555,500	Rp 8,482,500
115	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Kuching)	Rp 27,550,000	Rp 5,278,000
116	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Manila)	Rp 23,403,000	Rp 16,675,000
117	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Penang)	Rp 11,107,000	Rp 7,902,500
118	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Phnom Penh)	Rp 28,724,500	Rp 23,591,500
119	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Singapura)	Rp 9,758,500	Rp 5,843,500
120	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Vientiane)	Rp 29,362,500	Rp 20,590,000
121	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Yangon)	Rp 17,574,000	Rp 15,268,500
122	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Tawau)	Rp 20,691,500	Rp 10,063,000
123	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Songkhla)	Rp 16,747,500	Rp 11,933,500
124	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Canberra)	Rp 91,408,000	Rp 36,250,000
125	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Darwin)	Rp 71,050,000	Rp 57,478,000
126	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Melbourne)	Rp 55,303,000	Rp 41,441,000
127	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Noumea)	Rp 85,796,500	Rp 27,782,000
128	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Perth)	Rp 26,114,500	Rp 22,112,500
129	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Port Moresby)	Rp 200,607,500	Rp 119,654,000
130	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Suva)	Rp 64,684,500	Rp 38,700,500
131	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Sydney)	Rp 61,436,500	Rp 37,076,500
132	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Vanimo)	Rp 39,730,000	Rp 34,510,000
133	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Wellington)	Rp 142,535,000	Rp 59,740,000

Keterangan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	NEGARA	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II, JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA DAN UTAMA SERTA PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, I/II, PPPK, PEGAWAI NON ASN DAN PIHAK LAIN
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1	Amerika Serikat	Rp 9,555,500	Rp 8,163,500	Rp 7,322,500	Rp 6,481,500
2	Kanada	Rp 8,004,000	Rp 6,771,500	Rp 6,032,000	Rp 5,292,500
3	Argentina	Rp 7,743,000	Rp 5,829,000	Rp 5,089,500	Rp 5,060,500
4	Venezuela	Rp 8,076,500	Rp 5,626,000	Rp 4,988,000	Rp 4,973,500
5	Brasil	Rp 6,322,000	Rp 5,742,000	Rp 5,481,000	Rp 5,089,500
6	Chili	Rp 6,293,000	Rp 5,365,000	Rp 4,814,000	Rp 4,263,000
7	Kolombia	Rp 6,757,000	Rp 5,988,500	Rp 5,872,500	Rp 5,292,500
8	Peru	Rp 6,655,500	Rp 5,104,000	Rp 4,640,000	Rp 4,060,000
9	Suriname	Rp 5,771,000	Rp 5,278,000	Rp 3,886,000	Rp 3,886,000
10	Ekuador	Rp 6,032,000	Rp 5,147,500	Rp 4,625,500	Rp 4,103,500
11	Meksiko	Rp 8,018,500	Rp 6,786,000	Rp 6,046,500	Rp 5,307,000
12	Kuba	Rp 6,568,500	Rp 5,582,500	Rp 5,002,500	Rp 4,422,500
13	Panama	Rp 6,061,000	Rp 5,176,500	Rp 4,640,000	Rp 4,103,500
14	Austria	Rp 7,308,000	Rp 6,568,500	Rp 5,031,500	Rp 4,596,500
15	Belgia	Rp 7,801,000	Rp 6,612,000	Rp 5,887,000	Rp 5,176,500
16	Perancis	Rp 7,946,000	Rp 6,728,000	Rp 5,988,500	Rp 5,524,500
17	Jerman	Rp 7,032,500	Rp 6,017,500	Rp 5,336,000	Rp 4,698,000
18	Belanda	Rp 7,032,500	Rp 6,032,000	Rp 5,336,000	Rp 4,698,000
19	Swiss	Rp 9,222,000	Rp 8,265,000	Rp 6,438,000	Rp 5,814,500
20	Denmark	Rp 8,250,500	Rp 7,119,500	Rp 6,206,000	Rp 5,437,500
21	Finlandia	Rp 7,554,500	Rp 6,409,000	Rp 5,713,000	Rp 5,017,000
22	Norwegia	Rp 9,004,500	Rp 8,105,500	Rp 5,640,500	Rp 5,597,000
23	Swedia	Rp 8,917,500	Rp 7,525,500	Rp 6,684,500	Rp 5,843,500
24	Inggris	Rp 11,484,000	Rp 11,223,000	Rp 8,453,500	Rp 8,439,000
25	Bosnia dan Herzegovina	Rp 6,612,000	Rp 6,090,000	Rp 4,843,000	Rp 4,828,500
26	Kroasia	Rp 8,047,500	Rp 7,337,000	Rp 5,887,000	Rp 5,872,500
27	Spanyol	Rp 6,626,500	Rp 5,988,500	Rp 4,857,500	Rp 4,292,000
28	Yunani	Rp 6,191,500	Rp 5,495,500	Rp 4,741,500	Rp 4,190,500
29	Italia	Rp 10,179,000	Rp 9,236,500	Rp 6,467,000	Rp 6,191,500
30	Portugal	Rp 6,162,500	Rp 5,539,000	Rp 5,539,000	Rp 3,958,500
31	Serbia	Rp 6,046,500	Rp 5,437,500	Rp 4,727,000	Rp 4,176,000
32	Bulgaria	Rp 5,887,000	Rp 5,321,500	Rp 4,640,000	Rp 4,118,000
33	Ceko	Rp 8,961,000	Rp 7,627,000	Rp 6,481,500	Rp 5,321,500
34	Hongaria	Rp 7,032,500	Rp 6,351,000	Rp 5,655,000	Rp 5,002,500
35	Polandia	Rp 6,931,000	Rp 6,017,500	Rp 5,263,500	Rp 4,640,000
36	Rumania	Rp 6,032,000	Rp 5,524,500	Rp 4,538,500	Rp 4,016,500
37	Rusia	Rp 8,062,000	Rp 7,424,000	Rp 5,901,500	Rp 5,887,000
38	Slovakia	Rp 6,336,500	Rp 5,713,000	Rp 4,944,500	Rp 4,393,500

NO.	NEGARA	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II, JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA DAN UTAMA SERTA PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, I/II, PPPK, PEGAWAI NON ASN DAN PIHAK LAIN
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
39	Ukraina	Rp 7,032,500	Rp 6,322,000	Rp 5,437,500	Rp 4,799,500
40	Nigeria	Rp 6,786,000	Rp 6,206,000	Rp 5,872,500	Rp 5,365,000
41	Senegal	Rp 6,684,500	Rp 5,698,500	Rp 4,872,000	Rp 4,509,500
42	Etiopia	Rp 6,090,000	Rp 5,423,000	Rp 4,785,000	Rp 4,132,500
43	Kenya	Rp 6,626,500	Rp 6,061,000	Rp 4,988,000	Rp 4,466,000
44	Madagaskar	Rp 5,742,000	Rp 5,307,000	Rp 4,147,000	Rp 3,654,000
45	Tanzania	Rp 6,641,000	Rp 5,597,000	Rp 5,176,500	Rp 4,393,500
46	Zimbabwe	Rp 6,235,000	Rp 5,800,000	Rp 4,785,000	Rp 4,582,000
47	Mozambik	Rp 6,844,000	Rp 6,322,000	Rp 5,162,000	Rp 4,625,500
48	Namibia	Rp 6,409,000	Rp 5,452,000	Rp 4,524,000	Rp 3,900,500
49	Afrika Selatan	Rp 6,380,000	Rp 5,800,000	Rp 5,263,500	Rp 4,596,500
50	Aljazair	Rp 5,713,000	Rp 5,234,500	Rp 4,625,500	Rp 4,205,000
51	Mesir	Rp 6,974,500	Rp 6,177,000	Rp 5,872,500	Rp 5,234,500
52	Maroko	Rp 5,843,500	Rp 5,118,500	Rp 4,495,000	Rp 3,944,000
53	Tunisia	Rp 5,495,500	Rp 4,350,000	Rp 3,857,000	Rp 3,436,500
54	Sudan	Rp 6,423,500	Rp 5,916,000	Rp 5,191,000	Rp 4,060,000
55	Libya	Rp 6,612,000	Rp 5,698,500	Rp 4,930,000	Rp 4,640,000
56	Azerbaijan	Rp 7,221,000	Rp 6,655,500	Rp 5,292,500	Rp 5,278,000
57	Bahrain	Rp 6,887,500	Rp 6,148,000	Rp 4,118,000	Rp 3,146,500
58	Irak	Rp 6,684,500	Rp 5,684,000	Rp 5,089,500	Rp 4,495,000
59	Yordania	Rp 7,308,000	Rp 6,206,000	Rp 5,539,000	Rp 4,872,000
60	Kuwait	Rp 8,424,500	Rp 7,119,500	Rp 6,336,500	Rp 5,553,500
61	Libanon	Rp 6,626,500	Rp 5,640,500	Rp 5,046,000	Rp 4,451,500
62	Qatar	Rp 7,337,000	Rp 6,496,000	Rp 5,060,500	Rp 4,205,000
63	Suriah	Rp 5,191,000	Rp 4,364,500	Rp 3,944,000	Rp 3,523,500
64	Turki	Rp 6,612,000	Rp 5,278,000	Rp 4,509,500	Rp 4,002,000
65	Uni Emirat Arab	Rp 8,613,000	Rp 7,279,000	Rp 6,467,000	Rp 5,669,500
66	Yaman	Rp 5,118,500	Rp 3,610,500	Rp 3,277,000	Rp 2,958,000
67	Saudi Arabia	Rp 6,786,000	Rp 5,771,000	Rp 5,162,000	Rp 4,553,000
68	Kesultanan Oman	Rp 7,482,000	Rp 6,336,500	Rp 5,655,000	Rp 4,973,500
69	Republik Rakyat Tiongkok	Rp 5,959,500	Rp 5,089,500	Rp 4,567,500	Rp 4,045,500
70	Hongkong	Rp 8,714,500	Rp 7,351,500	Rp 6,539,500	Rp 5,727,500
71	Jepang	Rp 7,525,500	Rp 6,206,000	Rp 5,539,000	Rp 4,872,000
72	Korea Selatan	Rp 7,467,500	Rp 6,771,500	Rp 6,162,500	Rp 6,104,500
73	Korea Utara	Rp 7,163,000	Rp 4,654,500	Rp 4,350,000	Rp 4,031,000
74	Afganistan	Rp 5,582,500	Rp 3,799,000	Rp 3,451,000	Rp 3,103,000
75	Bangladesh	Rp 4,915,500	Rp 4,538,500	Rp 3,523,500	Rp 3,451,000
76	India	Rp 6,119,000	Rp 4,770,500	Rp 4,741,500	Rp 4,712,500
77	Pakistan	Rp 4,973,500	Rp 4,016,500	Rp 3,639,500	Rp 3,262,500
78	Srilanka	Rp 5,626,000	Rp 4,814,000	Rp 4,335,500	Rp 3,857,000

NO.	NEGARA	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II, JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA DAN UTAMA SERTA PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III, I/II, PPPK, PEGAWAI NON ASN DAN PIHAK LAIN
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
79	Iran	Rp 6,104,500	Rp 4,814,000	Rp 4,335,500	Rp 3,857,000
80	Uzbekistan	Rp 5,684,000	Rp 5,104,000	Rp 4,161,500	Rp 3,683,000
81	Kazakhstan	Rp 6,612,000	Rp 6,090,000	Rp 4,843,000	Rp 4,828,500
82	Filipina	Rp 5,974,000	Rp 5,321,500	Rp 3,857,000	Rp 3,277,000
83	Singapura	Rp 8,917,500	Rp 7,525,500	Rp 6,684,500	Rp 5,843,500
84	Malaysia	Rp 5,713,000	Rp 4,408,000	Rp 3,973,000	Rp 3,538,000
85	Thailand	Rp 5,684,000	Rp 4,785,000	Rp 4,306,500	Rp 3,828,000
86	Myanmar	Rp 5,336,000	Rp 3,625,000	Rp 3,045,000	Rp 2,842,000
87	Laos	Rp 5,510,000	Rp 4,016,500	Rp 3,639,500	Rp 3,262,500
88	Vietnam	Rp 5,553,500	Rp 4,234,000	Rp 3,538,000	Rp 3,175,500
89	Brunei Darussalam	Rp 5,423,000	Rp 4,031,000	Rp 3,654,000	Rp 3,277,000
90	Kamboja	Rp 4,292,000	Rp 3,233,500	Rp 2,914,500	Rp 2,842,000
91	Timor Leste	Rp 5,684,000	Rp 5,133,000	Rp 3,422,000	Rp 3,074,000
92	Australia	Rp 9,222,000	Rp 8,482,500	Rp 6,148,000	Rp 5,698,500
93	Selandia Baru	Rp 7,902,500	Rp 6,684,500	Rp 5,959,500	Rp 5,234,500
94	Kaledonia Baru	Rp 6,162,500	Rp 5,611,500	Rp 4,335,500	Rp 3,857,000
95	Papua Nugini	Rp 7,540,000	Rp 6,902,000	Rp 6,220,500	Rp 5,452,000
96	Fiji	Rp 6,191,500	Rp 5,292,500	Rp 4,741,500	Rp 4,190,500

Catatan:

- 1. Uang Harian dalam kurs Rupiah (1 USD = 14.500 Rupiah)
- 2. Uang Harian digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

A. BIAYA TRANSPORTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO	KECAMATAN	BIAYA BANTUAN SURVEY (UNIT KENDARAAN)	BIAYA CARTER KENDARAAN (PP)
(1)	(2)	(3)	(5)
1	SANGATTA - SANGATTA UTARA	200,000	250,000
2	SANGATTA - SANGATTA SELATAN	400,000	500,000
3	SANGATTA - TELUK PANDAN	625,000	1,500,000
4	SANGATTA - RANTAU PULUNG	1,490,000	1,500,000
5	SANGATTA - BENGALON	1,790,000	1,500,000
6	SANGATTA - KALIORANG	1,490,000	2,050,000
7	SANGATTA - KAUBUN	1,370,000	2,300,000
8	SANGATTA - SANGKULIRANG	1,790,000	2,300,000
9	SANGATTA - MUARA WAHAU	1,910,000	3,250,000
10	SANGATTA - KONGBENG	1,430,000	3,400,000
11	SANGATTA - MUARA BENGKAL	1,550,000	3,600,000
12	SANGATTA - MUARA ANCALONG	1,730,000	4,200,000
13	SANGATTA - LONG MESANGAT	1,430,000	4,455,000
14	SANGATTA - BATU AMPAR	1,730,000	3,400,000
15	SANGATTA - TELEN	1,610,000	2,850,000
16	SANGATTA - KARANGAN	1,610,000	4,100,000
17	SANGATTA - BUSANG	1,790,000	6,900,000
18	SANGATTA - SANDARAN	1,850,000	8,200,000

Ketentuan :

1. Biaya Carter merupakan biaya perjalanan pulang - pergi dari ibukota Kabupaten menuju Ibukota Kecamatan.
2. Biaya Bantuan Survey adalah Tambahan Biaya Transportasi/Biaya Transportasi dari Ibukota Kecamatan Menuju Wilayah Pedesaan dan diberikan dalam bentuk Riil cost (apabila tidak mendapat bukti kuitansi maka dapat menggunakan surat pernyataan kebenaran pengeluaran biaya riil).
3. Biaya Bantuan Survey dan Biaya Carter Kendaraan digunakan untuk maksimal 4 orang pelaksana Perjalanan Dinas (menggunakan 1 unit kendaraan) dan bukan merupakan biaya sewa kendaraan.
4. Biaya bantuan BBM perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas disesuaikan dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU atau bukti pembelian yang sah. Apabila tidak mendapatkan bukti pembelian yang sah maka melampirkan surat pernyataan kebenaran pengeluaran biaya riil (khusus perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur yang tidak terdapat SPBU).

B. TRANSPORTASI ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	ANTAR KECAMATAN	BIAYA CARTER KENDARAAN (PP)
1	Karangan - Teluk Pandan	5,910,000
2	Karangan - Bengalon	3,360,000
3	Karangan - Rantau Pulung	4,920,000
4	Karangan - Kaliorang	2,640,000
5	Karangan - Kaubun	1,770,000
6	Karangan - Sangkulirang	3,060,000
7	Karangan - Sandaran	3,270,000
8	Karangan - Muara Ancalong	7,170,000
9	Karangan - Muara Bengkal	6,870,000
10	Karangan - Busang	8,760,000
11	Karangan - Long Mesangat	8,340,000
12	Karangan - Batu Ampar	6,000,000
13	Karangan - Telen	5,790,000
14	Karangan - Muara Wahau	6,150,000
15	Karangan - Kongbeng	6,360,000
16	Teluk Pandan - Bengalon	2,460,000
17	Teluk Pandan - Rantau Pulung	2,670,000
18	Teluk Pandan - Kaliorang	3,930,000
19	Teluk Pandan - Kaubun	4,410,000
20	Teluk Pandan - Sangkulirang	4,380,000
21	Teluk Pandan - Sandaran	3,960,000
22	Teluk Pandan - Muara Ancalong	3,900,000
23	Teluk Pandan - Muara Bengkal	3,690,000
24	Teluk Pandan - Busang	5,670,000
25	Teluk Pandan - Long Mesangat	3,750,000
26	Teluk Pandan - Batu Ampar	3,690,000
27	Teluk Pandan - Telen	5,670,000
28	Teluk Pandan - Muara Wahau	6,060,000
29	Teluk Pandan - Kongbeng	6,270,000
30	Bengalon - Rantau Pulung	1,560,000
31	Bengalon - Kaliorang	1,440,000
32	Bengalon - Kaubun	1,890,000
33	Bengalon - Sangkulirang	1,890,000
34	Bengalon - Sandaran	3,030,000
35	Bengalon - Muara Ancalong	5,310,000
36	Bengalon - Muara Bengkal	5,100,000
37	Bengalon - Busang	6,870,000
38	Bengalon - Long Mesangat	4,980,000
39	Bengalon - Batu Ampar	4,230,000
40	Bengalon - Telen	3,990,000
41	Bengalon - Muara Wahau	4,350,000
42	Bengalon - Kongbeng	4,560,000
43	Rantau Pulung - Kaliorang	3,000,000
44	Rantau Pulung - Kaubun	3,480,000
45	Rantau Pulung - Sangkulirang	3,480,000
46	Rantau Pulung - Sandaran	4,080,000
47	Rantau Pulung - Muara Ancalong	3,840,000
48	Rantau Pulung - Muara Bengkal	3,630,000
49	Rantau Pulung - Busang	5,400,000
50	Rantau Pulung - Long Mesangat	3,510,000
51	Rantau Pulung - Batu Ampar	2,730,000
52	Rantau Pulung - Telen	2,940,000

NO.	ANTAR KECAMATAN	BIAYA CARTER KENDARAAN (PP)
53	Rantau Pulung - Muara Wahau	3,330,000
54	Rantau Pulung - Kongbeng	3,540,000
55	Kaliorang - Kaubun	870,000
56	Kaliorang - Sangkulirang	690,000
57	Kaliorang - Sandaran	2,100,000
58	Kaliorang - Muara Ancalong	6,750,000
59	Kaliorang - Muara Bengkal	6,540,000
60	Kaliorang - Busang	8,310,000
61	Kaliorang - Long Mesangat	6,420,000
62	Kaliorang - Batu Ampar	5,670,000
63	Kaliorang - Telen	5,430,000
64	Kaliorang - Muara Wahau	5,820,000
65	Kaliorang - Kongbeng	6,000,000
66	kaubun - Sangkulirang	1,260,000
67	Kaubun - Sandaran	2,280,000
68	Kaubun - Muara Ancalong	7,200,000
69	Kaubun - Muara Bengkal	6,990,000
70	Kaubun - Busang	8,790,000
71	Kaubun - Long Mesangat	6,870,000
72	Kaubun - Batu Ampar	6,120,000
73	Kaubun - Telen	5,910,000
74	Kaubun - Muara Wahau	6,270,000
75	Kaubun - Kongbeng	6,480,000
76	Sangkulirang - Sandaran	1,800,000
77	Sangkulirang - Muara Ancalong	7,200,000
78	Sangkulirang - Muara Bengkal	6,990,000
79	Sangkulirang - Busang	8,790,000
80	Sangkulirang - Long Mesangat	6,870,000
81	Sangkulirang - Batu Ampar	6,120,000
82	Sangkulirang - Telen	5,910,000
83	Sangkulirang - Muara Wahau	6,270,000
84	Sangkulirang - Kongbeng	6,480,000
85	Sandaran - Muara Ancalong	6,180,000
86	Sandaran - Muara Bengkal	6,060,000
87	Sandaran - Busang	6,480,000
88	Sandaran - Long Mesangat	5,940,000
89	Sandaran - Batu Ampar	5,550,000
90	Sandaran - Telen	5,430,000
91	Sandaran - Muara Wahau	5,550,000
92	Sandaran - Kongbeng	5,280,000
93	Muara Ancalong - Muara Bengkal	210,000
94	Muara Ancalong - Busang	3,090,000
95	Muara Ancalong - Long Mesangat	1,170,000
96	Muara Ancalong - Batu Ampar	1,980,000
97	Muara Ancalong - Telen	3,270,000
98	Muara Ancalong - Muara Wahau	4,320,000
99	Muara Ancalong - Kongbeng	4,530,000
100	Muara Bengkal - Busang	2,850,000
101	Muara Bengkal - Long Mesangat	960,000
102	Muara Bengkal - Batu Ampar	1,320,000
103	Muara Bengkal - Telen	3,030,000
104	Muara Bengkal - Muara Wahau	4,080,000
105	Muara Bengkal - Kongbeng	4,290,000
106	Busang - Long Mesangat	1,860,000
107	Busang - Batu Ampar	3,120,000

NO.	ANTAR KECAMATAN	BIAYA CARTER KENDARAAN (PP)
108	Busang - Telen	4,830,000
109	Busang - Muara Wahau	5,970,000
110	Busang - Kongbeng	6,420,000
111	Long Mesangat - Batu Ampar	1,200,000
112	Long Mesangat - Telen	3,000,000
113	Long Mesangat - Muara Wahau	4,050,000
114	Long Mesangat - Kongbeng	4,500,000
115	Batu Ampar - Telen	1,800,000
116	Batu Ampar - Muara Wahau	2,850,000
117	Batu Ampar - Kongbeng	3,510,000
118	Telen - Muara Wahau	1,650,000
119	Telen - Kongbeng	2,040,000
120	Muara Wahau - Kongbeng	720,000

C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

KABUPATEN	SATUAN	DIKLAT	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)
KUTAI TIMUR	OH	Rp 130,000	Rp 170,000

D. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 125,000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 100,000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 75,000

Catatan :
Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam wilayah Kutai Timur diberikan secara Lumpsum.

E. UANG PENGINAPAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

TARIF HOTEL (OH)					
WILAYAH / KECAMATAN		KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II, JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA DAN UTAMA SERTA PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, I/II, PPPK, PEGAWAI NON ASN DAN PIHAK LAIN
NO.		TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D
1	KECAMATAN TELUK PANDAN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
2	KECAMATAN BENGALON	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 500,000	Rp 300,000
3	KECAMATAN RANTAU PULUNG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
4	KECAMATAN MUARA ANCALONG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
5	KECAMATAN MUARA BENGKAL	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
6	KECAMATAN LONG MESANGAT	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 500,000	Rp 300,000
7	KECAMATAN BUSANG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 500,000	Rp 300,000
8	KECAMATAN BATU AMPAR	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
9	KECAMATAN TELEN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
10	KECAMATAN KALIORANG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
11	KECAMATAN KAUBUN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
12	KECAMATAN KARANGAN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
13	KECAMATAN SANDARAN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
14	KECAMATAN SANGATTA UTARA	Rp 1,500,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000
15	KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Rp 1,500,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000
16	KECAMATAN KONGBENG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 400,000
17	KECAMATAN MUARA WAHAU	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000
18	KECAMATAN SANGKULIRANG	Rp 1,500,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 300,000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	PENGANGKUTAN
1	Tingkat A Pejabat Negara Lainnya seperti Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Lainnya yang setara.	6,000,000	menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	Tingkat B untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II, Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Utama serta Pejabat lainnya yang setara.	4,800,000	
3	Tingkat C untuk Pejabat Esselon III/PNS Gol IV.	4,200,000	
4	Tingkat D untuk Pejabat Esselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, PPPK, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.	4,200,000	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Format Telaahan Staf Perjalanan Dinas:

KOP SKPD

TELAAHAN STAF

- Kepada Yth :(atasan yang dituju)
Dari :(jabatan pembuat telaahan staf)
Tanggal :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :(hal yang akan disampaikan)
- I. Pokok Persoalan :(pernyataan singkat dan jelas tentang persolan yang akan di pecahkan)
- II. Praanggapan :(dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dgn situasi yg dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang)
- III. Fakta yang Mempengaruhi :(memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan)
- IV. Analisis/Pembahasan :(memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan)
- V. Simpulan :(memuat intisari hasil diskusin dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi)
- VI. Saran /Tindak Lanjut :(memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dan/atau permohonan persetujuan penugasan pejabat/staf yang ditunjuk)
1.
- 2..... Dst
- VII. Penutup :(kalimat penutup)

Sangatta,.....

.....(nama jabatan),

.....

NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Format Surat Perintah / Surat Tugas Perjalanan Dinas:

KOP SKPD

..... (Nama jabatan yang memberi perintah)

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : 1. (undangan, nota dinas, telaahan atau peraturan)
2.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP/NRTK2D :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

dst....

Untuk : 1. (maksud perjalanan dinas)
2.

Tempat :

Tanggal :

Setelah selesai melaksanakan tugas agar memberikan laporan kepada
memberi tugas.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....(nama jabatan)

..... (nama)
.....(Pangkat/Golongan)
.....(NIP)

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN





LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Format Kuitansi/Bukti Pembayaran Perjalanan Dinas:

UNTUK DINAS		Tahun Anggaran :
Lembar Ke		No. Kuitansi :
		Nomor BKU :
		Kode Rekening :
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN		
Sudah Terima Dari	:	
Jumlah Uang	:	Rp.....
Terbilang	:	
Untuk Pembayaran	:	
Sesuai SPT Nomor : Dengan Rincian Perhitungan Terlampir.		
		Sangatta, Tanda Tangan Penerima
<u>Nama</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Rp.....	1.
2.	Rp.....	2.
3.	Rp.....	3.
dst...		
Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, (.....) NIP.		Lunas di bayar Sangatta, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, (.....) NIP.
Menyetujui, Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, (.....) NIP.		



BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Format Kuitansi Perjalanan Dinas untuk DPRD:



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :
Nomor BKU :
Kode Rekening :

KUITANSI

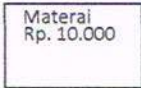
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang :
Rupiah

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

Dengan rincian :

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Uang harian | : | Rp..... |
| 2. Biaya transportasi | : | Rp..... |
| 3. Biaya penginapan | : | Rp..... |
| 4. Uang representatif perjalanan dinas | : | Rp..... |
| 5. Biaya taksi | : | Rp..... |

..... 20.....
Penerima,



ttd

Meyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

ttd

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Format Pernyataan Kebenaran Pengeluaran Biaya Riil Perjalanan Dinas:

KOP SKPD

PERNYATAAN KEBENARAN PENGELUARAN BIAYA RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
Tanggal Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya (Transportasi/Penginapan/BBM) pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.		

2. Jumlah uang tersebut pada poin 1 (satu), benar - benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kembali kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui,

PA / KPA

Sangatta,
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP/NRTK2D



BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas:

KOP SKPD

I. Pendahuluan

1. Dasar Pelaksanaan Tugas : Surat Perintah Tugas Nomor :
Tanggal :
2. Lamanya Perjalanan Dinas : (.....) Hari
3. Pegawai yang ditugaskan : 1.
2.
3.
dst.....

II. Maksud dan Tujuan

.....(Maksud dan tujuan dari perjalanan dinas)

III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

.....(Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan)

IV. Hasil

.....(hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, h
lain yg perlu dilaporkan)

V. Penutup

..... (harapan/permintaan arahan/ucapan terimakasih)

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang Membuat Laporan :

1. 1.
2. 2.
3. 3.
dst.....

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Kegiatan
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Ruang Lingkup Kegiatan
- E. Agenda Kegiatan

II. PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat
- B. Hasil Kegiatan

III. PEMBIAYAAN

IV. PENUTUP

- A. Rencana Tindak Lanjut
 - 1. Sasaran output untuk Pemda/Organisasi
 - 2. Sasaran outcome untuk Pemda/Organisasi
 - 3. Strategi pencapaian output dan outcome
- B. Hambatan dan Tantangan

V. Lampiran

- A. Surat permohonan rekomendasi dari Pemerintah Daerah
- B. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- C. Surat Persetujuan (SP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara
- D. Dokumentasi

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Format Pakta Integritas untuk Perjalanan Dinas DPRD:



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

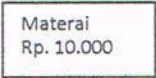
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1). Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor Tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan Ke dari tanggal s.d.
- 2). Bahwa saya bersedia mempeertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3). Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai hokum yang berlaku.

....., 20.....
Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Format Surat Perjalanan Dinas (Visum):



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Nama/NIP Pegawai Yang Melaksanakan Perjalanan		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat Angkut Yang Dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/tiba ditempat baru*)	a. b. c.	
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10.	Keterangan Lain-Lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....
Tanggal.....
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.....

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	(.....) NIP	Kepala (.....) NIP
III	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	(.....) NIP	Kepala (.....) NIP
IV	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	(.....) NIP	Kepala (.....) NIP
V	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	(.....) NIP	Kepala (.....) NIP
VI	Tiba di :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala :	
	Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP	
VII	Catatan Lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.....

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

